



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI
KABUPATEN KLATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;

24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2019;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 63);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 69);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 70);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136);
34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 34);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTIJENSI
BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Klaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya

disebut Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten yang secara *ex-officio* dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.

9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
14. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun sosial.
15. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana.
17. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. Status Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
19. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan

segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.

20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat.
21. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.
22. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
24. Tim Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana adalah tim yang mengkaji dan menilai akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
27. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen

perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.

28. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
29. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
30. Sistem Komando Darurat Bencana selanjutnya disingkat SKD adalah suatu system penanganan darurat bencana berdasarkan satu komando yang digunakan oleh BNPB/BPBD untuk mengerahkan sumberdaya dari instansi/lembaga, lembaga usaha dan masyarakat untuk mencapai penanganan darurat bencana yang efektif.
31. Komando Darurat Bencana adalah organisasi penanganan keadaan darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
32. Staf Komando (Command Staff) adalah pembantu Komandan Darurat Bencana dalam menjalankan urusan Sekretariat, Hubungan Masyarakat, Perwakilan instansi/lembaga serta Keselamatan dan Keamanan.
33. Staf Umum (General Staff) adalah pembantu Komandan Darurat Bencana dalam menjalankan fungsi utama Komando Darurat Bencana untuk Bidang Operasi, Bidang Perencanaan, Bidang Logistik dan Peralatan serta Bidang Administrasi Keuangan untuk penanganan darurat bencana

yang terjadi.

34. Fasilitas Komando Tanggap Bencana adalah personil, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang dapat terdiri dari pusat komando, personil komando, gudang, sarana dan prasarana transportasi, peralatan, komunikasi dan informasi.
35. Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BNPB/BPBD terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kaji cepat bencana, meliputi identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumberdaya alam maupun buatan, dan dampak bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi penilaian kebutuhan (need assesment), penilaian kerusakan dan kerugian (damage and losses assesment) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
38. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA KONTINGENSI

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi yaitu sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi.
- (2) Tujuan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi adalah :
 - a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi secara maksimal bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di tingkat Kabupaten Klaten;

- b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana erupsi gunung merapi saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
- c. terwujudnya komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah untuk penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi;
- d. sebagai instrument koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan erupsi Gunung Merapi;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sifat Rencana Kontingensi;
- b. penyelenggaraan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi;
- c. Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi; dan
- d. Evaluasi Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi.

BAB IV SIFAT RENCANA KONTINGENSI

Pasal 4

Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersifat :

- a. Partisipatoris; bahwa dalam penyusunannya melibatkan semua pihak;
- b. Dinamis; selalu terbaru sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB V PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI

Pasal 5

Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi 13 (tiga) wilayah administrasi yaitu :

- a. Kecamatan Kemalang;
- b. Kecamatan Manisrenggo;
- c. Kecamatan Prambanan;
- d. Kecamatan Jatinom;
- e. Kecamatan Jogonalan;
- f. Kecamatan Tulung;

- g. Kecamatan Karangnongko;
- h. Kecamatan Kebonarum;
- i. Kecamatan Klaten Selatan;
- j. Kecamatan Polanharjo;
- k. Kecamatan Wedi;
- l. Kecamatan Gantiwarno;
- m. Kecamatan Klaten Tengah.

BAB VI

RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI

Pasal 6

- (1) Rencana Kontingensi erupsi Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan arahan bagi Pemerintah Daerah dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Erupsi Gunung Merapi.
- (2) Rencana Kontingensi erupsi Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

EVALUASI RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI

Pasal 7

- (1) Rencana Kontingensi erupsi Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dievaluasi paling singkat setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Klaten dapat bekerja sama dengan pihak lain;
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi kelompok relawan kebencanaan, instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya,.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;
- d. Dunia usaha; dan
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 34

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI

ERUPSI GUNUNG MERAPI

KABUPATEN KLATEN

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten Tahun 2018 yang disusun bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan telah selesai.

Bencana Erupsi Gunung Merapi telah melanda sebagian wilayah Kabupaten Klaten tahun 2010 dan menyebabkan penderitaan serta menghancurkan penghidupan masyarakat. Sejarah kejadian Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 tersebut memberikan kita pelajaran, bahwa kita membutuhkan sebuah dokumen perencanaan untuk menghadapi bencana tersebut jika kembali terjadi.

Dokumen rencana kontijensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Klaten dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat Erupsi Gunung Merapi. Dokumen rencana kontigensi ini memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian pada saat situasi darurat, para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Klaten dapat mengetahui peran, tugas dan fungsi mereka masing-masing dalam melakukan kegiatan tanggap darurat sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik serta mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk yang terdampak sebagai perwujudan dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dari bencana.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan standar data personil dan waktu. Karena hal-hal tersebut itu diperlukan adanya saran dan kritik dari semua pihak. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dan terima kasih.

DAFTAR ISI

Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	Iv	
Daftar Gambar	vi	
BAB I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum Wilayah	1
	C. Sejarah Kabupaten Klaten	3
	D. Letak Wilayah	5
	E. Topografi dan penggunaan Lahan	6
	F. Curah Hujan	8
	G. Penduduk dan Angkatan Kerja	9
	H. Pendidikan dan Kesehatan	12
	I. Pertanian dan Perkebunan	14
	J. Peternakan dan Perikanan	14
	K. Industri dan Energi	15
	L. Perdagangan	15
	M. Transportasi dan Komunikasi	15
	N. Keuangan daerah	16
BAB II	Penilaian Bahaya dan Penentuan Kejadian	
	Penentuan Kejadian	17
	A. Penilaian Biaya	17
	B. Penentuan Kebijakan	18
BAB III	Pengembangan Skenario Kejadian Dan asumsi Dampak Bencana	22
	A. Pengembangan Skenario Kejadian Bencana	22
	B. Asumsi Ancaman Kejadian Bencana Erupsi Gunung Merapi	22
	C. Asumsi Ancaman Bencana Akibat Erupsi Gunung Merapi	25
	D. Asumsi Dampak Bencana	25
	1 Dampak Terhadap Wilayah Lainnya	25
	2 Dampak Terhadap Kependudukan	26
	E. Dampak Terhadap Fasilitas Publik dan Aset	27
	F. Dampak Terhadap Ekonomi	28
	G. Dampak Terhadap Pemerintahan	29

	H	Dampak Terhadap Lingkungan	29
	I	Dampak Terhadap Kesehatan	29
BAB IV		Penetapan Tujuan Kebijakan Dan Strategi Penanganan Darurat	30
I IV			
	A	Tujuan Penanganan Darurat	30
	B		30
		Kebijakan Penanganan Darurat	
	C		30
		Strategi Penanganan Darurat	
BAB V		Perencanaan Bidang Operasi	31
	A		31
		Rancangan Sistem Komando Penanganan Darurat	
	B		31
		Rencana Lokasi Pos Komando dan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana	
	C	Rencana Lokasi Tempat Pengungsian Beserta Kapasitasnya	32
	D		32
		Perencanaan Penanganan Darurat Bencana	
	D.1		33
		Manajemen Pos Komando Penanganan Darurat Bencana	
	D.2	Bidang Operasi Sub Bidang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	36
	D.3	Bidang Operasi Sub Bidang Logistik	38
	D.4	Bidang Operasi Sub Kesehatan	39
	D.5	Bidang Operasi Sub Pengerahan Relawan	42
	D.6	Bidang Operasi Sub Bidang Peralatan dan Sarana /Prasarana	43
		Pengungsian	
BAB VI		Rencana Tindak lanjut	46
	A	Diseminasi Rencana Kontinjensi	46
	B		46
		Aktivasi Rencana Kontinjensi	
	C		47
		Kaji Ulang Rencana Kontinjensi	
	D		47
		Uji Draft Rencana Kontinjensi	
	E		48
		Formalisasi/Legalisasi Rencana Kontinjensi	
BAB VII		Penutup	49

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Hal
1	Tabel 1 Luas Kabupaten Klaten Dirinci Per Kecamatan	7
2	Tabel 2 Data Curah Hujan Kabupaten Klaten tahun 2015	8
3	Tabel 3 Tabel Rata-rata Curah hujan	9
4	Tabel 4 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Klaten 2015	10
5	Tabel 5 Jumlah Penduduk berdasarkan kategori umur Kabupaten Klaten 2015	10
6	Tabel 6 Pencari Kerja Menurut Bulan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Klaten Tahun 2017	11
7	Tabel 7 Pencari Kerja Menurut Bulan, Penempatan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Klaten Tahun 2015	12
8	Tabel 8 Sarana Pendidikan Kabupaten klaten	13
9	Tabel 9 Sarana Kesehatan Kabupaten Klaten	14
10	Tabel 10 Tabel Kemungkinan Terjadi Bencana	17
11	Tabel 11 Tabel Perkiraan Dampak Bencana	17
12	Tabel 12 Penilaian Bahaya	17
13	Tabel 13 Skenario Dampak Terhadap Kependudukan	25
14	Tabel 14 Dampak Pada penduduk Rentan	26
15	Tabel 15 Asumsi Dampak Pada Ekonomi	27
16	Tabel 16 Dampak Pada Sarana dan Prasarana	28
17	Tabel 17 Asumsi Dampak Pada Lingkungan	29
18	Tabel 18 Kegiatan Manajemen Posko PDB	34
19	Tabel 19 Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya Manajemen Posko PDB	35
20	Tabel 20 Kegiatan Bidang Operasi Sub Bidang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	36
21	Tabel 21 Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya Sub Bidang Pencarian, pertolongan dan Evakuasi	37
22	Tabel 22 Kegiatan Sub Bidang Logistik	38
23	Tabel 23 Proyeksi Kebutuhan sumberdaya Sub Logistik	39
24	Tabel 24 Tabel V.6. Proyeksi Kebutuhan sumberdaya Sub Logistik Bidang Operasi Sub Bidang Kesehatan	40
25	Tabel 25 Proyeksi Kebutuhan Bidang Kesehatan	41

26	Tabel 26	Kegiatan Sub Bidang Pengerahan relawan	43
27	Tabel 27	Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya Sub Bidang Pengerahan Relawan	43
28	Tabel 28	Kegiatan Sub Bidang Sandang, Papan dan Hunian	44
29	Tabel 29	Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya Sub Bidang Peralatan dan Sarana/Prasarana Pengungsian.	44

DAFTAR GAMBAR

No	Nama GAMBAR	Hal
1	Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Klaten	6
2	Gambar 2. Letusan Gunung Merapi 2010 yang menghasilkan awan panas.	20
3	Gambar 3. Status Gunung Api	21

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaan Kontingensi adalah "suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan membuat skenario dan tujuan berdasarkan kesepakatan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta sistem tanggapan dan pengalihan potensi untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis". Rencana Kontingensi lahir dari proses perencanaan kontingensi, proses perencanaan tersebut melibatkan sekelompok orang atau organisasi yang berkerjasama secara berkelanjutan untuk merumuskan dan menyepakati tujuan-tujuan bersama, mendefinisikan tanggung jawab dan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak dan rencana kontingensi disusun dalam tingkat yang dibutuhkan.

Sifat rencana kontingensi adalah "single hazard", hanya digunakan untuk 1 (satu) jenis ancaman. Namun demikian, dalam hal bencana benar-benar terjadi, dimungkinkan terdapat dampak ikutan yang merupakan bencana baru/bencana ikutan. Rencana kontingensi merupakan upaya dan inisiatif dalam penanggulangan bencana untuk menurunkan indeks risiko bencana di daerah. Secara spesifik rencana kontingensi bertujuan untuk memberikan landasan operasional, strategis dan pedoman bagi seluruh pihak untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan baik ketika suatu jenis bencana terjadi. Penerapan rencana kontingensi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rencana kontingensi disusun pada keadaan diperkirakan potensi suatu ancaman akan terjadi. Apabila bencana benar terjadi, maka Rencana Kontingensi dapat diaktivasi atau dioperasionalkan menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat setelah terlebih dahulu melalui pengkajian cepat. Rencana Kontingensi ini dimaksudkan untuk menjadi prosedur yang sistematis dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan tanggap darurat jika terjadi bencana erupsi Gunung Merapi. Rencana Kontingensi ini adalah upaya untuk menyatukan perencanaan dan tindakan pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok peduli dalam penanganan Erupsi Gunung Merapi di kabupaten Klaten.

Gambaran Umum Wilayah

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam konteks regional, kedudukan kabupaten Klaten sangat strategis karena letaknya yang berada pada jalur ekonomi regional yang menghubungkan ke pusat-pusat pertumbuhan di wilayah barat, timur, utara, dan selatan, yaitu Surakarta-Jakarta, Yogyakarta-Surabaya, Yogyakarta-Semarang dan Surakarta-Yogyakarta.

Klaten merupakan salah satu kabupaten yang terletak di tengah Pulau Jawa diapit oleh beberapa provinsi di sekitarnya. Karakter fisik Klaten mempunyai bentuk yang bervariasi. Hal ini tidak lepas dari proses pembentukan pulau Jawa oleh

tumbukan lempeng tektonik yang mengangkat bagian tepi lempeng benua Eurasia. Sebagaimana layaknya kepulauan yang terjadi karena tumbukan lempeng, di Klaten terdapat busur gunungapi (*ring of fire*) yang tumbuh pada zona lemah sehingga terdapat banyak gunungapi di atasnya di bagian tepi Samudera Hindia. Selain itu, dampak dari tumbukan tektonik tersebut adalah terjadinya pengangkatan dan pelipatan lapisan geologi pembentuk pulau sehingga membentuk geomorfologi yang bervariasi seperti dataran, landai, perbukitan dan dataran tinggi. Kondisi geologi yang demikian tersebut menjadikan Klaten mempunyai potensi dan ancaman akan bencana alam. Hal ini berdampak juga pada Kabupaten Klaten dan Gempa bumi di Klaten merupakan bukti yang menghiasi rekaman bencana alam yang pernah terjadi di Klaten.

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran : Pertama, dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung. Kedua, dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Pegunungan Kapur. Ketiga, dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas. Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi. Terdapat 5 klasifikasi jenis tanah di Kabupaten Klaten yaitu :

1. **Litosol/Litosol :**

Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah kecamatan Bayat dan sekitarnya.

2. **Regosol Kelabu/Grey Regosol:**

Bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.

3. **Grumusol Kelabu Tua/Dark Grey Grumosol:**

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.

4. **Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua/Dark Grey And Grey Regosol Complex:**

Bahan induk berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

5. **Regosol Coklat Kekelabuan/Grey Brown Regosol:**

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

Secara Administrasi, Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 (dua puluh enam) Kecamatan, 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) Desa dan 10 (sepuluh) Kelurahan.

C. Sejarah Kabupaten Klaten

Ada dua versi yang menyebutkan tentang asal muasal nama Klaten. Versi pertama mengatakan bahwa Klaten berasal dari kata *kelati* atau buah bibir. Kata *kelati* ini kemudian mengalami disimilasi menjadi Klaten. Klaten sejak dulu merupakan daerah yang terkenal karena kesuburannya. Versi kedua menyebutkan Klaten

berasal dari kota Melati. Kata Melati kemudian berubah menjadi Mlati. Berubah lagi jadi kata Klati, sehingga memudahkan ucapan kata Klati berubah menjadi kata Klaten. Versi ke dua ini atas dasar kata-kata orangtua sebagaimana dikutip dalam buku *Klaten dari Masa ke Masa* yang diterbitkan Bagian Ortakala Setda Kab. Dati II Klaten Tahun 1992/1993.

Melati adalah nama seorang kyai yang pada kurang lebih 560 tahun yang lalu datang di suatu tempat yang masih berupa hutan belantara. Kyai Melati Sekolekan, nama lengkap dari Kyai Melati, menetap di tempat itu. Semakin lama semakin banyak orang yang tinggal di sekitarnya, dan daerah itulah yang menjadi Klaten yang sekarang.

Dukuh tempat tinggal Kyai Melati oleh masyarakat setempat lantas diberi nama Sekolekan. Nama Sekolekan adalah bagian darinama Kyai Melati Sekolekan. Sekolekan kemudian berkembang menjadi Sekalekan, sehingga sampai sekarang nama dukuh itu adalah Sekalekan. Di Dukuh Sekalekan itu pula Kyai Melati dimakamkan. Kyai Melati dikenal sebagai orang berbudi luhur dan lagi sakti. Karena kesaktiannya itu perkampungan itu aman dari gangguan perampok. Setelah meninggal dunia, Kyai Melati dikuburkan di dekat tempat tinggalnya.

Sampai sekarang sejarah kota Klaten masih menjadi silang pendapat. Belum ada penelitian yang dapat menyebutkan kapan persisnya kota Klaten berdiri. Selama ini kegiatan peringatan tentang Klaten diambil dari hari jadi pemerintah Kab Klaten, yang dimulai dari awal terbentuknya pemerintahan daerah otonom tahun 1950.

Daerah Kabupaten Klaten semula adalah bekas daerah swapraja Surakarta. Kasunanan Surakarta terdiri dari beberapa daerah yang merupakan suatu kabupaten. Setiap kabupaten terdiri atas beberapa distrik. Susunan penguasa kabupaten terdiri dari Bupati, Kliwon, Mantri Jaksa, Mantri Kabupaten, Mantri Pembantu, Mantri Distrik, Penghulu, Carik Kabupaten angka 1 dan 2, Lurah Langsik, dan Langsir.

Susunan penguasa Distrik terdiri dari Pamong Distrik (1 orang), Mantri Distrik (5), Carik Kepanawon angka 1 dan 2 (2 orang), Carik Kemanten (5 orang), Kajineman (15 orang). Pada zaman penjajahan Belanda, tahun 1749, terjadi perubahan susunan penguasa di Kabupaten dan di Distrik. Untuk Jawa dan Madura, semua propinsi dibagi atas kabupaten-kabupaten, kabupaten terbagi atas distrik-distrik, dan setiap distrik dikepalai oleh seorang wedono.

Pada tahun 1847 bentuk Kabupaten diubah menjadi Kabupaten Pulisi. Maksud dan tujuan pembentukan Kabupaten Pulisi adalah di samping Kabupaten itu

menjalankan fungsi pemerintahan, ditugaskan pula agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan dengan ditentukan batas-batas kekuasaan wilayahnya.

Berdasarkan Nawala Sampeyan Dalem Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana Senopati Ing Alaga Abdul Rahman Sayidin Panata Gama VII, Senin Legi 23 Jumadilakhir Tahun Dal 1775 atau 5 Juni 1847 dalam bab 13 disebutkan :

“.....” *Kraton Dalam **Surakarta** Adiningrat Nganakake Kabupaten cacah enem.*

“.....” *Kabupaten cacah enem iku Nagara **Surakarta**, Kartosuro, **Klaten**, **Boyolali**, **Ampel**, lan **Sragen**.*

“.....” *Para Tumenggung kewajiban rumeksa amrih tata tentreme bawahe dhewe-dhewe serta padha kebawah marang Raden Adipati.*

Luas daerah Kabupaten Klaten mengalami beberapa kali perubahan. Klaten pada mulanya adalah tanpa kecamatan Jatinom dan Polanharjo. Kedua kecamatan semula merupakan wilayah kabupaten Boyolali, dan baru digabungkan tanggal 11 Oktober 1895. Semenjak terbentuknya onderdistrik, daerah onderdistrik terdiri dari beberapa dukuh. Sebagian dukuh-dukuh itu merupakan daerah kekuasaan seorang Demang. Gaji seorang Demang berupa tanah pituas. Luas tanah pituas antara Demang yang satu dan yang lainnya berbeda-beda, sesuai dengan besar kecilnya jasa yang diberikan kepada Kasunanan. Penerima terkecil dinamakan Bekel, kemudian Demang, Ronggo, dan terbesar disebut Ngabei. Pada tahun 1914 dibentuk kelurahan, yang merupakan penggabungan dari beberapa dukuh. Tanah pituas yang semula untuk gaji Bekel, Demang, Ronggo, dan Ngabei, diberikan pada kelurahan sebagai milik desa yang kemudian menjadi lungguh pamong desa. Struktur organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Kamituwa, Carik, Kebayan, Modin, dan Ulu-ulu.

Tahun 1957 dilakukan pemblengketan atau penggabungan beberapa kelurahan, atas ketentuan kasunanan bahwa setiap Kelurahan paling sedikit harus berpenduduk 1300 orang. Peristiwa itu dikenal sebagai masa kompleks. Sebelumnya, di Klaten telah dilakukan penggabungan karena alasan lain. Masa kompleks di Klaten telah terjadi sejak tahun 1917. di beberapa onderdistrik, penggabungan Kelurahan dilakukan karena beberapa Kelurahan tidak mempunyai tanah untuk kas desa maupun untuk lungguh pada pegawainya. (Sumber: *Selintas Hasil Pembangunan Kabupaten Klaten*, h. 11-15)

D. Letak Wilayah

Kabupaten Klaten adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak dibagian selatan. Klaten terletak diantara 110° 26' 14" - 110° 47' 51" Bujur Timur dan 7° 32' 19" - 7° 48' 33" Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 665,56 km².

Menurut topografi kabupaten Klaten terletak diantara gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter diatas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan. Dari segi ketinggiannya, wilayah kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan, dengan variasi ketinggian, yaitu 9,72% terletak di ketinggian 0 100 meter dari permukaan air laut 77,52% terletak di ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500 – 2.500 meter diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kabupaten Klaten seluas 65.556 Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian seluas 39.647 Ha. Luas tersebut berkurang bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan Lahan Bukan Pertanian seluas 25.909 Ha. meningkat bila dibandingkan tahun 2015. Untuk lahan pertanian terdiri dari lahan sawah seluas 33.066 Ha dan lahan bukan sawah seluas 6.581 Ha.

Tabel 1.
Luas Kabupaten Klaten Dirinci Per Kecamatan

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	BS Biasa	BS Khusus	Luas Wilayah (Km2)
01. Prambanan	16	-	183	147	-	24.43
02. Gantiwarno	16	-	149	122	-	25.64
03. Wedi	19	-	178	164	-	24.38
04. Bayat	18	-	228	174	-	39.43
05. Cawas	20	-	238	189	-	34.47
06. Trucuk	18	-	171	239	-	33.81
07. Kalikotes	7	-	99	99	-	12.98
08. Kebonarum	7	-	65	61	-	9.07
09. Jogonalan	18	-	202	160	-	26.70
10. Manisrenggo	16	-	252	113	-	26.96
11. Karangnongko	14	-	35	97	-	26.74
12. Ngawen	13	-	124	121	-	16.97
13. Ceper	18	-	42	184	-	24.45
14. Pedan	14	-	151	143	-	19.17
15. Karangdowo	19	-	161	135	-	29.23
16. Juwiring	19	-	208	182	-	29.79
17. Wonosari	18	-	149	175	-	31.14
18. Delanggu	16	-	37	130	-	18.78
19. Polanharjo	18	-	44	125	-	23.84
20. Karanganom	19	-	48	141	-	24.00
21. Tulung	18	-	185	141	-	32.00
22. Jatinom	17	1	207	157	-	35.53

23. Kemalang	13	-	214	105	-	51.66
24. Klaten Selatan	11	1	112	117	1	14.43
25. Klaten Tengah	3	6	97	117	1	8.92
26. Klaten Utara	6	2	124	120	-	10.38
Jumlah/Total 2015	391	10	3 703	3 658	2	655.56
2014	391	10	3 703	3 658	2	655.56
2013	391	10	3 703	3 658	2	655.56
2012	391	10	3 703	3 658	2	655.56
2011	391	10	3 703	3 658	2	655.56

Sumber / Source : BPS Kabupaten Klaten tahun 2017

Perubahan penggunaan lahan akan sangat dipengaruhi dengan pertumbuhan penduduk. Selama tahun 2016 terjadi perubahan lahan sawah menjadi bangunan untuk perumahan, industri, perusahaan dan jasa seluas 45.391 Ha. turun sebesar 17,08% bila dibandingkan tahun 2015. Peruntukan terbesar terjadi dari sawah menjadi perumahan yaitu sebesar 72,82%.

F. Curah Hujan

Kabupaten Klaten dikenal sebagai daerah penghujan dengan intensitas sedang dengan curah hujan tinggi terjadi di bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April, November dan Desember. Bulan-bulan kemarau atau tidak terjadi hujan adalah bulan-bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Berikut adalah data curah hujan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.

Data Curah Hujan Kabupaten Klaten tahun 2015

Kecamatan		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Prambanan	354	315	412	299	59	29	-	-	-	-	26	304	1 798
2	Gantiwarno	278	244	300	200	43	14	-	-	-	-	35	261	1 375
3	Wedi	306	288	358	257	22	13	-	-	-	-	42	410	1 693
4	Bayat	146	146	251	224	19	0	-	-	-	-	94	270	1 150
5	Cawas	180	180	345	338	56	16	-	-	-	-	213	272	1 599
6	Trucuk	202	281	389	277	100	3	-	-	-	-	121	322	1 694
8	Kebonarum	294	587	444	443	100	36	-	-	-	-	135	305	2 344
9	Jogonalan	354	305	570	324	159	5	-	-	-	-	60	370	2 146
10	Manisrenggo	447	322	503	447	79	9	-	-	-	-	107	240	2 153
11	Karangnongko	396	438	341	78	0	0	-	-	-	-	53	432	1 738
12	Ngawen	691	645	695	763	300	0	-	-	-	-	166	382	3 642
13	Ceper	217	373	322	288	111	15	-	-	-	-	66	203	1 595

14	Pedan	4 ²³	332	394	330	174	6	-	-	-	-	142	354	1 965
16	Juwiring	8 ²³	405	366	303	119	8	-	-	-	-	72	273	1 782
17	Wonosari	6 ²⁴	403	355	307	117	15	-	-	-	-	71	262	1 775
18	Delanggu	1 ²³	389	372	299	115	14	-	-	-	-	66	238	1 723
19	Polanharjo	7 ³³	420	350	399	102	32	-	-	-	-	64	296	1 998
20	Karanganom	8 ³⁶	383	354	402	209	14	4	-	-	-	105	368	2 207
21	Tulung	0 ²⁵	369	372	311	66	12	3	-	-	-	59	262	1 702
22	Jatinom	2 ⁴³	471	499	406	174	14	3	-	-	-	97	369	2 465
23	Kemalang	6 ³²	447	469	253	5	0	-	-	-	-	61	415	1 976
24	Klaten Selatan	2 ²⁵	606	441	445	96	36	-	-	-	-	115	317	2 308
25	Klaten Tengah	0 ⁴²	488	498	347	113	28	-	-	-	-	92	435	2 419
26	Klaten Utara	1 ²⁰	312	438	235	136	16	2	0	0	0	67	275	1 543

Sumber / Source : DPU Bidang Sumber Daya Air

Secara rata-rata curah hujan pertahun Kabupaten Klaten dapat digambarkan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.
Tabel rata-rata curah Hujan

BULAN/MONTH	RATA-RATA CURAH HUJAN (MM)/RAINFALL (MM)
(1)	(2)
Januari/January	201
Februari/February	312
Maret/March	438
April/April	235
Mei/May	136
Juni/June	16
Juli/July	2
Agustus/August	0
September/September	0
Oktober/October	0
Nopember/November	67
Desember/December	275

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 2018

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata curah hujan pertahun adalah 140 mm dengan curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April dan Desember. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah Maret. Sedangkan Bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan

November adalah bulan-bulan dengan curah hujan rendah. Bulan Agustus, September dan Oktober adalah bulan-bulan dengan curah hujan paling kecil.

G. Penduduk dan Angkatan Kerja

Kabupaten Klaten yang berada di propinsi Jawa Tengah adalah kabupaten yang secara ukuran luas termasuk kecil. Namun, jika Kabupaten Klaten dilihat dari jumlah pendudukan kepadatannya Kabupaten Klaten termasuk Kabupaten yang berpenduduk banyak dengan kepadatan tinggi. Penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2017 sebesar 1.167.401 (*Satu Juta Seratus Enampuluh Tujuh Ribu Empat Ratus Satu*) jiwa, naik sebesar 4.183 (*Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga*) jiwa atau 0,36% bila dibandingkan dengan tahun 2016. Kenaikan penduduk ini. Menyebabkan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten sebesar 1.781 per Kilometer persegi. Apabila dilihat dari jenis kelamin. penduduk laki – laki sebesar 573 892 jiwa. naik sebesar 0,34%. perempuan sebesar 594 509 jiwa. Naik sebesar 0,37% bila di bandingkan terhadap tahun 2016. Apabila di lihat dari kelompok umur. maka kelompok umur 65+ sebesar 129.845 (*Seratus Duapuluh Sembilan Ribu Delapan ratus Empat Puluh Lima*) jiwa mendominasi penduduk Kabupaten Klaten.

Tabel 4.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Klaten Tahun 2015

Kecamatan	2014	2015	Penambahan Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
01. Prambanan	48 521	49 030	524	1,08
02. Gantiwarno	34 339	34 459	115	0,33
03. Wedi	47 226	47 374	148	0,31
04. Bayat	53 065	53 434	98	0,18
05. Cawas	50 424	50 530	92	0,18
06. Trucuk	70 346	70 601	239	0,34
07. Kalikotes	33 296	33 512	221	0,66
08. Kebonarum	17 845	17 879	35	0,20
09. Jogonalan	54 059	54 337	287	0,53
10. Manisrenggo	39 342	39 622	272	0,69
11. Karangnongko	32 508	32 564	57	0,18
12. Ngawen	40 453	40 534	84	0,21
13. Ceper	58 634	58 729	104	0,18
14. Pedan	42 657	42 736	75	0,18
15. Karangdowo	38 563	38 644	73	0,19
16. Juwiring	53 708	53 802	95	0,18
17. Wonosari	58 214	58 473	263	0,45
18. Delanggu	39 474	39 564	98	0,25
19. Polanharjo	36 480	36 555	66	0,18
20. Karanganom	40 784	40 865	71	0,17
21. Tulung	45 499	45 583	82	0,18
22. Jatinom	53 819	54 150	330	0,61
23. Kemalang	35 446	35 768	323	0,91
24. Klaten Selatan	42 940	43 448	518	1,21
25. Klaten Tengah	39 981	40 046	69	0,17

26. Klaten Utara	46 147	46 556	428	0,93
Jumlah/ Total	1144 040	1158 795	4 767	0,41

Sumber / Source : Proyeksi Penduduk

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Klaten Berdasarkan kategori umur dari ana-anak sampai lansia dapat dilihat seperti tabel berikut.

Tabel. 5.
Jumlah Penduduk berdasarkan kategori umur Kabupaten Klaten 2015

Kecamatan	Dewasa 15 +			Anak (0 - 14)		
	L	P	L	P	L	Jumlah / Total
01 Prambanan	18.402	19.515	37.917	5.731	5.382	11.113
02 Gantiwarno	13.065	13.986	27.051	3.854	3.554	7.408
03 Wedi	17.727	19.262	36.989	5.309	5.076	10.385
04 Bayat	19.816	21.459	41.275	6.259	5.900	12.159
05 Cawas	19.134	21.062	40.196	5.317	5.017	10.334
06 Trucuk	26.569	27.972	54.541	8.371	7.689	16.060
07 Kalikotes	12.457	13.152	25.609	4.018	3.885	7.903
08 Kebonarum	6.721	7.308	14.029	1.956	1.894	3.850
09 Jogonalan	20.384	21.620	42.004	6.474	5.859	12.333
10 Manisrenggo	14.865	15.905	30.770	4.458	4.394	8.852
11 Karangnongko	12.254	13.342	25.596	3.669	3.299	6.968
12 Ngawen	15.393	16.023	31.416	4.723	4.395	9.118
13 Ceper	22.247	23.244	45.491	6.840	6.398	13.238
14 Pedan	16.280	17.146	33.426	4.785	4.525	9.310
15 Karangdowo	14.822	15.910	30.732	4.046	3.866	7.912
16 Juwiring	19.954	21.538	41.492	6.326	5.984	12.310
17 Wonosari	22.016	23.346	45.362	6.768	6.343	13.111
18 Delanggu	14.860	16.098	30.958	4.473	4.133	8.606
19 Polanharjo	13.671	14.932	28.603	4.144	3.808	7.952
20 Karanganom	15.433	16.635	32.068	4.515	4.282	8.797
21 Tulung	17.234	18.308	35.542	5.146	4.895	10.041
22 Jatinom	20.663	21.483	42.146	6.044	5.960	12.004
23 Kemalang	13.571	14.075	27.646	4.172	3.950	8.122
24 Klaten Selatan	16.307	17.032	33.339	5.178	4.931	10.109
25 Klaten Tengah	14.890	16.381	31.271	4.509	4.266	8.775
26 Klaten Utara	17.444	18.459	35.903	5.516	5.137	10.653
Jumlah / Total 015	2436.179	465.193	901.372	132.601	124.822	257.423
<i>Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Klaten</i>						

Pencari kerja di Kabupaten Klaten selama tahun 2017 sebanyak 9.359 orang, terdiri dari laki - laki sebanyak 5 129 orang dan perempuan sebesar 4.230 orang. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, sebanyak 823 orang atau sebesar 8.79% Berpendidikan Sarjana. 561 orang atau sebesar 5.99% berpendidikan

Sarjana Muda. 7.154 orang atau sebesar 76.44% berpendidikan SMA dan atau yang sederajat, 769 orang atau sebesar 8.22 % berpendidikan SMP. Dan 32 orang sebesar 0.34% berpendidikan SD.

Tabel.6

Pencari Kerja Menurut Bulan, Pendidikan dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Klaten Tahun 2017

	Bulan	SD		SMP		SMA		Sarjana Muda		Sarjana	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Januari		2	37	34	290	186	15	18	20	32
2	Pebruari	2	8	12	16	157	70	6	6	24	14
3	Maret	-	-	15	19	88	130	9	20	17	11
4	April	-	-	23	35	203	62	6	37	3	23
5	Mei	-	10	25	103	405	250	7	24	18	22
6	Juni	-	-	6	15	259	159	4	3	13	24
7	Juli	-	-	69	101	990	698	20	26	69	94
8	Agustus		2	42	52	611	387	17	27	37	53
9	September		6	8	9	507	361	17	47	25	58
10	Oktober			26	52	368	258	26	70	51	44
11	Nopember			8	30	242	154	23	65	61	59
12	Desember			13	19	179	140	16	52	2	31
	Jumlah/ Total 2017	2	30	284	485	4299	2855	166	395	358	465

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

Tabel 7.

Pencari Kerja Menurut Bulan, Penempatan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Bulan	Belum Ditempatkan Bulan lalu		Terdaftar Bulan Ini		Ditempatka n Bulan Ini		Dihapuskan Bulan Ini		Belum Ditempatkan Bulan Ini	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1. Januari	12583	8679	418	353	47	54	182	193	13042	8785
2. Pebruari	13042	8785	152	155	28	75	524	363	12642	8502
3. Maret	12642	8502	230	172	9	38	559	581	12304	8055
4. April	12304	8055	179	190	18	463	450	430	12015	7352
5. Mei	12015	7352	327	406	18	176	241	272	12083	7310
6. Juni	12083	7310	356	412	51	445	233	242	12155	7035
7. Juli	12155	7035	638	486	2	61	0	0	12791	7460
8. Agustus	12791	7460	667	556	12	89	51	50	13395	7877
9. September	13395	7877	524	509	49	65	210	154	13660	8167
10. Oktober	13660	8167	416	512	5	69	179	186	13892	8424
11. Nopember	13892	8424	359	363	15	124	327	406	13909	8257
12. Desember	13909	8257	330	273	23	286	356	352	13860	7892
2015	15447	9590	4596	4387	277	1945	331	3229	155748	95116
	1	3					2			

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten

H. Pendidikan dan Kesehatan

Jumlah murid TK swasta di Kabupaten Klaten selama tahun 2017 sebanyak 30.742 siswa, Turun sebesar 13.61% bila di bandingkan terhadap tahun 2016.

Jumlah guru TK sebanyak 2 454 orang, turun sebesar 9.62% terhadap tahun 2016. Untuk Sekolah Dasar dan sederajat. Tahun 2016 jumlah murid sebesar 113.474 orang, Naik sebesar 0,73% terhadap tahun 2015. Dengan jumlah guru sebesar 8.889 orang, naik sebesar 10,95% dari tahun sebelumnya. Untuk SMP dan sederajat jumlah siswa mencapai 53.130 siswa, turun 2,39% terhadap tahun 2015 dan jumlah guru sebanyak 3.969, tidak berubah terhadap tahun sebelumnya. Jumlah murid setingkat SMTA (termasuk SMK) tahun 2016 tercatat sebesar 44.160.

Tabel 8

Sarana Pendidikan Kabupaten Klaten

No.	KECAMATAN	SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat			SMK			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
	TOTAL	707	157	864	73	62	135	18	16	34	12	43	55	1,088
1	<u>Prambanan</u>	31	4	35	3	1	4	2	0	2	1	2	3	44
2	<u>Gantiwarno</u>	23	4	27	4	2	6	0	1	1	1	1	2	36
3	<u>Wedi</u>	28	7	35	2	5	7	1	0	1	0	1	1	44
4	<u>Bayat</u>	34	8	42	3	3	6	1	2	3	1	0	1	52
5	<u>Cawas</u>	40	5	45	4	4	8	1	0	1	0	3	3	57
6	<u>Trucuk</u>	39	12	51	3	5	8	0	0	0	1	0	1	60
7	<u>Kalikotes</u>	21	4	25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	26
8	<u>Kebonarum</u>	11	2	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	14
9	<u>Jogonalan</u>	26	4	30	2	1	3	1	0	1	1	3	4	38
10	<u>Manisrenggo</u>	28	6	34	3	1	4	0	0	0	0	1	1	39
11	<u>Karangnongko</u>	25	1	26	2	2	4	1	0	1	0	0	0	31
12	<u>Ngawen</u>	23	7	30	1	3	4	0	1	1	1	0	1	36
13	<u>Ceper</u>	31	12	43	3	2	5	1	0	1	0	3	3	52
14	<u>Pedan</u>	24	5	29	4	1	5	0	1	1	1	3	4	39
15	<u>Karangdowo</u>	29	7	36	4	1	5	1	0	1	0	1	1	43
16	<u>Juwiring</u>	33	12	45	2	4	6	0	1	1	1	0	1	53
17	<u>Wonosari</u>	38	5	43	2	3	5	1	1	2	0	2	2	52
18	<u>Delanggu</u>	25	5	30	4	4	8	0	1	1	0	2	2	41
19	<u>Polanharjo</u>	29	6	35	3	0	3	1	0	1	0	0	0	39
20	<u>Karanganom</u>	27	8	35	4	3	7	1	1	2	0	0	0	44
21	<u>Tulung</u>	29	8	37	3	2	5	0	0	0	1	0	1	43
22	<u>Jatinom</u>	35	4	39	4	2	6	1	0	1	0	2	2	48
23	<u>Kemalang</u>	25	0	25	2	3	5	0	0	0	0	0	0	30
24	<u>Klaten Selatan</u>	19	3	22	1	2	3	2	1	3	1	4	5	33
25	<u>Klaten Tengah</u>	20	10	30	4	3	7	0	1	1	0	7	7	45
26	<u>Klaten Utara</u>	14	8	22	4	5	9	3	5	8	2	8	10	49

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2017

Kabupaten Klaten merupakan sebuah Kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Guna menjaga kesehatan seluruh penduduk. Perlu didukung berbagai fasilitas kesehatan yang ada. Berbagi fasilitas kesehatan ada di Kabupaten Klaten di antaranya Rumah Sakit Swasta sebanyak 9 buah, Rumah Sakit Umum Pemerintah sebanyak 2 buah. Rumah Sakit Jiwa sebanyak 1 buah. Jumlah ijin praktek dokter yang dikeluarkan pada tahun 2017 meliputi: 123 dokter umum, 70 dokter gigi dan 136 dokter spesialis.

Tabel 9.
Sarana Kesehatan Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	RSU	RS Swasta	RS jiwa daerah	BKPM	Puskesmas	Puskemas Keliling	Puskesmas Pembantu
1	Prambanan	-	-	-	-	2	2	2
2	Gantiwarno	-	-	-	-	1	1	3
3	Wedi	-	-	1	-	1	1	3
4	Bayat	-	-	-	-	1	1	5
5	Cawas	-	-	-	-	2	2	4
6	Trucuk	-	-	-	-	2	2	4
7	Kalikotes	-	-	-	-	1	1	2
8	Kebonarum	-	-	-	-	1	1	1
9	Jogonatan	-	-	-	-	2	2	2
10	Manisrenggo	-	-	-	-	1	1	4
11	Karangnongko	-	-	-	-	1	1	3
12	Ngawen	-	-	-	-	1	1	3
13	Ceper	-	-	-	-	2	2	4
14	Pedan	-	-	-	-	1	1	4
15	Karangdowo	-	-	-	-	1	1	3
16	Juwiring	-	-	-	-	1	1	3
17	Wonosari	-	-	-	-	2	2	6
18	Delanggu	-	1	-	-	1	1	2
19	Polanharjo	-	-	-	-	1	1	4
20	Karanganom	-	-	-	-	1	1	5
21	Tulung	-	-	-	-	2	2	4
22	Jatinom	-	-	-	-	2	2	4
23	Kemalang	-	-	-	-	1	1	3
24	Klaten Selatan	1	1	-	1	1	1	3
25	Klaten Tengah	-	1	-	-	1	1	-
26	Klaten Utara	-	3	-	-	1	1	5

I. Pertanian dan Perkebunan

Serangan hama "wereng" yang terjadi pada tahun 2017 seluas 682 Ha, meningkatkan drastis bila dibandingkan terhadap tahun 2016. Berbeda dengan hama "wereng", serangan hama "pengerek batang" tahun 2017 seluas 1 454 Ha atau turun sebesar 19.93% dibanding tahun sebelumnya. Produksi padi sawah tahun 2017 sebesar 380 268 ton. Produksi kacang panjang naik sebesar 1.48%, terong turun sebesar 7.98%, mentimun naik sebesar 11.10% dan cabe merah turun sebesar 30.02%. Produksi buah melon tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 32.37%, semangka turun sebesar 64.90%, rambutan naik sebesar 17.07%. Sedangkan produksi pisang mengalami kenaikan sebesar 103.41%, jambu biji naik sebesar 100.08%, sawo turun sebesar 67.53%.

Selama tahun 2016, produksi tembakau rajang mengalami kenaikan sebesar 0,16%, tembakau asepan turun sebesar 10,82%. Sedangkan produksi kelapa dalam tahun 2016 turun sebesar 23,90%, kapok turun sebesar 8,15%.

J. Peternakan dan Perikanan

Peternak di Kabupaten Klaten banyak mengusahakan ternak sapi perah. Sapi potong, kambing, domba dan unggas. Populasi sapi perah selama tahun 2017 naik sebesar 5,85%, produksi susu turun sebesar 15.98%. Populasi sapi turun 5,41%, populasi kambing naik sebesar 10.88%. Sedangkan populasi domba naik sebesar 13.44%. Untuk Ternak kecil seperti ayam pedaging tidak mengalami perubahan, dan ayam buras turun sebesar 33.15%.

Luas areal perikanan di Kabupaten Klaten tahun 2017 sebesar 2 139.91 Ha. Areal perikanan terbesar terdapat di genangan air yaitu sebesar 81.21% dan waduk sebesar 8.41%. Kolam Pemancingan di kecamatan Polanharjo seluas 11.29 Ha mendominasi perikanan di kolam. Produksi ikan di Kabupaten Klaten turun sebesar 11.57% bila dibandingkan terhadap tahun 2016

K. Industri dan Energi

Jumlah Sentra industri di Kabupaten Klaten tahun 2017 sebanyak 389 dengan jumlah usaha sebanyak 9 849. Penyerapan tenaga kerja di usaha industri tersebut sebesar 41 519. Berdasarkan skala usaha, jumlah usaha industri besar dan

menengah sebanyak 134 dan 34 686 usaha berskala kecil. Nilai investasi pada usaha tersebut sebesar 1.62 triliun rupiah, sedangkan nilai produksi mencapai 7.03 triliun rupiah

Kapasitas produksi Air Minum Kabupaten Klaten tahun 2016 sebesar 11.2 juta M3 naik sebesar 0.28% bila dibandingkan dengan tahun 2016. Produksi yang terjual sebesar 8.5 juta m3, naik sebesar 2.82%. Produksi air bersih yang hilang pada tahun 2017 sebesar 2.8 juta M3, turun sebesar 6.73% bila dibandingkan terhadap tahun 2016. Kebutuhan listrik di Kabupaten Klaten meningkat, ditunjukkan dengan pemakaian listrik yang meningkat sebesar 3.33% dengan jumlah kwh sebesar 660 juta kwh.

L. Perdagangan

Selama tahun 2017, di Kabupaten Klaten tercatat 556 usaha pemegang tanda daftar perusahaan, mengalami penurunan sebesar 32.77% disbanding tahun sebelumnya. Jumlah pemegang surat ijin usaha perdagangan pada tahun 2017 sebanyak 480 usaha. Apabila dilihat dari skala usaha, maka usaha menengah mengalami peningkatan sebesar 9x disbanding tahun 2016. Jika dilihat dari jenis usaha, maka pemegang SIUP kebanyakan bergerak di bidang perdagangan barang yaitu sebesar 443 usaha.

Selama tahun 2016, jumlah pasar di Kabupaten Klaten tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2015. Begitu juga jumlah pasar swalayan tahun 2016 tercatat ada 118 pasar dan tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2015.

M. Transportasi dan Komunikasi

Panjang jalan di Kabupaten Klaten berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah tahun 2016 sepanjang 837.98 km. Permukaan jalan sudah diaspal 808,25 km, permukaan jalan beton sepanjang 26.83 km, dan permukaan jalan kerikil sepanjang 2.9 km. Secara umum, kondisi jalan masih dalam keadaan baik yaitu sepanjang 475.52 km. Seluruh jalan di Kabupaten Klaten termasuk kelas jalan III C.

Kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Klaten tahun 2017 sebesar 10.137 kendaraan, Terdiri dari bukan kendaraan umum sebanyak 8.823 kendaraan dan 1.314 kendaraan umum.

N. Keuangan Daerah

Jumlah KUD di Kabupaten Klaten tahun 2017 sebanyak 34 KUD, sama dengan tahun 2016. Untuk Koperasi Non KUD sebanyak 849 koperasi, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pekerja koperasi non KUD mengalami penurunan sebesar 9.97%. Jumlah anggotanya sebesar 132 235 orang, naik sebesar 11.81% bila dibandingkan terhadap tahun 2016.

Selama tahun 2016, di Kabupaten Klaten terjadi inflasi sebesar 2,31%. Inflasi tertinggi sebesar 0,65% terjadi pada bulan Juli. Sedangkan inflasi terendah sebesar -0,12% terjadi pada bulan Februari. Penyumbang terbesar inflasi di Kabupaten Klaten adalah kelompok bahan makanan sebesar 4,67%. Dan yang mengalami inflasi terendah kelompok transportasi dan komunikasi sebesar -1,41%.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Klaten tahun 2017 sebesar Rp 2.5 triliun rupiah, naik sebesar 13.11% bila dibandingkan terhadap tahun 2016. Apabila dilihat per mata anggaran, maka penyusun pendapat daerah di Kabupaten Klaten terbesar adalah Dana Perimbangan sebesar 62.94%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah terkecil adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menyumbang sebesar 0.38%.

BAB II

PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN

A. Penilaian Bahaya

Penilaian bahaya menggunakan pendekatan subyektif dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat partisipan penyusunan rencana kontijensi yang dalam hal ini adalah perwakilan relawan desa, komunitas-komunitas relawan, Organisasi Pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Polisi, Lembaga SAR, Palang Merah Indonesia dan lain-lainnya. Penilaian menggunakan dua parameter yakni kemungkinan terjadinya bahaya dan perkiraan dampak apabila bahaya terjadi dengan nilai masing-masing 1 hingga 4 dijelaskan di bawah ini:

Tabel 10 : Tabel Kemungkinan Terjadi Bencana :

No	Nilai	Keterangan
1	Nilai 4	kemungkinan terjadi waktu s/d – 6 bulan kedepan
2	Nilai 3	kemungkinan terjadi waktu 6 bulan - 1 tahun kedepan
3	Nilai 2	kemungkinan terjadi waktu 1 tahun – 5 tahun kedepan
4	Nilai 1	kemungkinan terjadi waktu diatas 5 tahun kedepan

Tabel 11 : Tabel Perkiraan Dampak Bencana:

No	Nilai	Keterangan
1	Nilai 4	sangat parah (80% - 99% wilayah hancur/terdampak dan lumpuh total)
2	Nilai 3	parah (50 – 80% wilayah hancur/terdampak)
3	Nilai 2	sedang (30 - 50 % wilayah terdampak)
4	Nilai 1	ringan (10 – 30% wilayah terdampak/rusak)

Proses penilaian dilakukan dengan diskusi kelompok dan diskusi pleno. Dari hasil kesepakatan diskusi diperoleh hasil penilaian di bawah ini.

Tabel 12. Penilaian Bahaya

No	Jenis Ancaman	Probabilitas	Dampak	Total Nilai
1	Erupsi Gunung Merapi	3	3	6
2	Banjir	3	1	4
3	Kekeringan	2	2	4
4	Cuaca Ekstrim	2	2	4
5	Gempabumi	1	2	3
6	Kebakaran	2	1	2
7	Tanah Longsor	1	1	2

Bahaya Erupsi Gunung Merapi menjadi jenis bahaya dengan skor tertinggi yakni 6 (enam). Dari parameter kemungkinan terjadi mendapat nilai 3 (tiga) artinya bahaya Erupsi Gunung Merapi berkemungkinan terjadi waktu 6 bulan - 1 tahun kedepan. Sedangkan parameter perkiraan dampak mendapat nilai 3 (tiga) artinya

dampak bahaya Erupsi Gunung Merapi diperkirakan parah dan akan melanda antara 50% hingga 80% wilayah Kabupaten Klaten.

Penentuan Kejadian

Ancaman bencana Gunung api Merapi merupakan gunungapi teraktif di dunia. Setiap meletus mengeluarkan berjuta-juta meter kubik material meluncur ke Sungai Gendol di Kabupaten Sleman Yogyakarta dan Kali Woro yang berada di Kabupaten Klaten.

Letusan Gunung berapi berawal dari magma yang mengalami tekanan dan menjadi lebih renggang dibanding lapisan di bawah kerak sehingga secara bertahap magma bergerak naik. Seringkali mencapai celah atau retakan yang terdapat pada kerak. Banyak gas dihasilkan dan pada akhirnya tekanan yang berbentuk sedemikian besar sehingga menyebabkan suatu letusan ke permukaan (erupsi). Pada tahapan ini, gunungapi menyemburkan bermacam gas, debu, dan pecahan batuan. Lava yang mengalir dari suatu celah didaerah yang datar akan membentuk Plateu Lava. Lava yang menumpuk disekitar mulut (lubang) membentuk gunung dengan bentuk kerucut seperti umumnya.

Kategori bahaya letusan Gunungapi Merapi terdiri atas :

1. Bahaya Primer

Bahaya Primer adalah bahaya utama yang langsung menimpa penduduk yang berada pada jangkauan lontaran lava pijar atau berada di jangkauan luncuran awan panas, ketika letusan berlangsung, seperti :

a. Guguran lava pijar dan lontaran lava pijar.

Guguran Lava Pijar dan lontaran lava pijar dapat terbentuk akibat guguran atau runtuhnya kubah lava baru atau tumpukan material lama yang masih panas di puncak. Guguran lava pijar bersifat membakar dan merusak lingkungan yang terlanda. Dalam kondisi tekanan yang sangat kuat, letusan yang kuat dapat juga menyemburkan lava atau yang disebut dengan lava pijar. Semburan atau lontaran lava pijar ini sangat berbahaya dan sangat mematikan karena sifatnya yang sangat panas jika sampai mengenai tubuh manusia atau hewan.

b. Awan Panas (*Pyroclastic Flow*)

Awan Panas bersifat paling merusak daripada jenis bahaya yang lain. Awan Panas adalah aliran massa panas (300°C-600°C) berupa campuran gas dan material gunungapi yang terdiri dari berbagai ukuran bergumpal bergerak turun secara turbulen dengan kecepatan 100-150km/jam. Kecepatan ini juga sangat tergantung pada bidang luncur dan faktor pengontrol. Kemiringan tanah, kerapatan tegakan pohon, jenis tanah serta topografi akan berpengaruh pada kecepatan luncuran awan panas. Semakin miring bidang luncuran maka akan semakin cepat luncuran awan panas tersebut, Dan semakin tiadanya kerapatan tegakan pohon maka luncuran awan panas tersenut akan meluncur tanpa hambatan, ibarat melalui jalan toll. Dan yang paling sering terjadi adalah luncuran tersebut akan mengikuti jalur sungai yang cenderung lurus.

c. Material Vulkanis :

Seperti batu, kerikil pasir dan debu vulkanis juga sangat berbahaya bagi manusia. Debu vulkanis yang mengandung silika sangat berbahaya jika terhirup karena siatnya yang sangat kecil sehingga akan sangat mudah terhirup. Jika masuk dalam sistem pernafasan dapat mengakibatkan terlukannya paru-paru karena debu tersebut bergerigi dan tajam dan dapat melukai paru-paru.

Gambar 3.

Letusan Gunung Merapi 2010 yang menghasilkan awan panas.



Gambar 3 : Letusan tahun 2010 (Sumber : Antara/2010)

2. Bahaya Sekunder

Bahaya Sekunder adalah bahaya yang terjadi setelah letusan seperti :

a. Lahar

Aliran lumpur vulkanik yang dihasilkan karena endapan produk letusan/awan panas yang terbawa air (hujan) dan membentuk aliran pekat mengalir ke area yang lebih rendah di lereng gunungapi.

b. Hujan di sekitar Gunungapi Merapi

Lereng barat 2416 mm/tahun, lereng selatan 3253 mm/tahun, terjadi pukul 12.00 Wib- 19.00 Wib, sehingga 80% lahar terjadi sore hari. Hujan local/stationary/orographic 66% memicu lahar, hujan regional/migratory 33% menyebabkan lahar dalam skala relative besar. Lahar terjadi 10 menit setelah intensitas hujan mencapai puncaknya.

3. Bahaya Tersier.

Bahaya Tersier merupakan bahaya akibat kerusakan lingkungan gunungapi (hilangnya daerah resapan/Hutan/mata air dan akibat dari penambangan) hilangnya pepohonan di sekitar gunung, juga terancamnya habitat hewan-hewan yang hidup di sekitar Gunung Merapi.

Sebelum meletus Gunung Api biasanya ditandai dengan aktivitas-aktivitas vulkanik seperti terbentuknya kubah lava, naiknya intensitas kegempaan, terjadinya deformasi, meningkatnya keasaman di sekitar kawah dan juga naiknya suhu di sekitar kawah. Aktivitas-aktivitas vulkanik tersebut kemudian dijadikan parameter untuk menyusun sistem informasi dan sistem peringatan dini dalam bentuk status Gunung Api. Status tersebut adalah seperti dalam gambar berikut :

Gambar 4.

Status Gunung Api



Sumber : Kompas.com

BAB III

PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK BENCANA

Pengembangan Skenario Kejadian Bencana

Pada kajian penilaian risiko dan penentuan kejadian (Bab III), diketahui bahwa nilai probabilitas (nilai 3) dan dampak (nilai 3) dan rata-rata angka kerentanan untuk Kabupaten Klaten termasuk kategori tinggi. Dengan demikian alternatif yang diambil adalah untuk skenario berat. Skenario yang dikembangkan untuk kejadian Erupsi Gunung Merapi serta dampak asapnya untuk tahun 2019 diprediksi sebagai berikut :

B. Asumsi Ancaman Kejadian Bencana Erupsi Gunung Merapi

Ativitas Gunung Merapi dapat diketahui dari informasi yang dikeluarkan oleh BPPTKG (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi) yang berada di daerah Istimewa Yogyakarta. Status Gunung Merapi atau yang disebut dengan Catur Gatra Gunung Merapi meliputi : Normal, Waspada, Siaga dan Awas.

No	Status	Kegiatan
1.	Normal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa ▪ Masyarakat meningkatkan kapasitas dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi ▪ Mengikuti informasi resmi terkait dengan status Gunung Merapi dari lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang terutama dari BPPTKG ▪ Menyimpan harta, surat-surat penting/berharga ditempat yang aman dan terjangkau jika terjadi pengungsian secara mendadak mudah untuk mengambilnya dan memcatat seluruh harta benda tersebut. ▪ Jika terjadi letusan minor atau freatik (yang biasanya tidak dihalului dengan tanda-tanda yang secara visual nampak) masyarakat segera mencari tempat perlindungan yang aman dari material jatuhan seperti abu, pasir dan kerikil serta menjauhi sungai.
2.	Waspada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari diluar radius 3 kilometer dari puncak Gunung Merapi. ▪ Masyarakat mengikti informasi resmi terkait dengan status Gunung Merapi karena kenaikan status dapat terjadi sewaktu-waktu sesuai dengan parameter

		<p>aktivitas Gunung Merapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat menyiapkan surat-surat penting/berharga atau harta benda yang dapat dibawa dalam satu tempat yang mudah dibawa dan ditempatkan pada tempat yang mudah terjangkau. ▪ Masyarakat mengikuti sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi. ▪ Masyarakat harus paham lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi yang telah ditentukan. ▪ Jika terjadi letusan minor atau freatik (yang biasanya tidak dihalului dengan tanda-tanda yang secara visual nampak) masyarakat segera mencari tempat perlindungan yang aman dari material jatuhan seperti abu, pasir dan kerikil serta menjauhi sungai.
3.	Siaga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat tidak diperkenankan untuk beraktivitas ditempat yang berbahaya sesuai dengan arahan atau rekomendasi dari BPPTKG. ▪ Masyarakat melakukan evakuasi dengan mendahulukan masyarakat yang tinggal di kawasan KRB III (Kawasan Rawan Bencana III). ▪ Masyarakat mengamankan harta benda yang dapat dibawa seperti uang dan perhiasan dan surat penting/berharga. ▪ Masyarakat juga menyiapkan tas siaga yang berisi bekal untuk mengungsi seperti pakaian, senter, obat-obatan sederhana, alat komunikasi seperti handphone dan handy talky bagi yang mempunyai, makanan ringan, minuman. ▪ Masyarakat yang memiliki ternak juga mengamankan ternaknya dalam proses evakuasi. ▪ Masyarakat selalu mengikuti informasi terkini terkait dengan perkembangan status dan aktivitas Gunung Merapi ▪ Segera mengungsi bila mulai terlihat guguran lava pijar/awan panas yang ditandai dengan suara gemuruh yang menerus. ▪ Pada status ini kelompok rentan sudah dapat diungsikan terlebih dahulu, termasuk juga dengan ternaknya.
4.	Awas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat yang tinggal di KRB III wajib mengungsi yang wilayahnya diperkirakan

		<p>terlanda awan panas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat membawa serta tas siaga yang telah dipersiapkan. ▪ Masyarakat mengevakuasi diri ke tempat yang aman sesuai dengan arahan dari koordinator evakuasi desa. ▪ Masyarakat wajib mengikuti tata cara hidup dalam pengungsian. ▪ Masyarakat tidak boleh kembali ke rumah sebelum status Gunung Merapi dinyatakan aman oleh pemerintah melalui lembaga yang berwenang. ▪ Masyarakat harus mematuhi semua arahan atau rekomendasi dari pemerintah melalui lembaga yang berwenang.
--	--	--

C. Asumsi Ancaman Bencana Akibat Erupsi Gunung Merapi

- A. Ancaman Awan panas, Lava pijar dan lontaran material akan mengancam seluruh warga dan permukiman yang berada di kawasan Kawasan Rawan Bencana III di kawasan Gunung Merapi yang meliputi Desa Tegalmulyo, Desa Sidorejo dan Desa Balerante.
- B. Ancaman abu vulkanik akan mengancam warga dan permukiman bahkan dapat menjangkau tempat-tempat yang jauh bahkan puluhan kilo meter dan dapat mengancam kesehatan manusia, hewan ternak bahkan pepohonan.
- C. Lahar yang berasal dari material vulkanik baik pasir, kerikil batu yang terbawa oleh aliran air akibat terjadinya hujan deras di kawasan Gunung Merapi dapat mengancam hidup dan kehidupan warga dan seluruh permukiman yang berada di dekat sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
- D. Seluruh ancaman tersebut akan mengganggu pelayanan umum seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan umum perkantoran pemerintah, transportasi darat dan udara, bahkan rusaknya fasilitas-fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, kantor desa, tempat wisata, pasar dan lain-lain dan fasilitas sosial seperti tempat ibadah, tempat pertemuan, bahkan kepemilikan pribadi seperti rumah, kendaraan dan lain sebagainya

D. Asumsi Dampak Bencana

1. Dampak Terhadap Wilayah Lainnya

Erupsi Gunung Merapi terjadi dengan perkiraan rata-rata antara 2 tahun sampai 7 tahun dengan rata-rata kejadian siklus 4 tahunan. Tetapi itu bukan berarti bahwa Gunung Merapi selalu meletus dalam kurun waktu 4 tahun. Berdasarkan pengembangan skenario dan pengalaman letusan tahun-tahun sebelumnya khususnya tahun 2010, yang meninggalkan area terdampak baik langsung dan tidak langsung serta kajian lainnya maka wilayah yang paling rawan terhadap Erupsi Gunung Merapi adalah kecamatan Kemalang. Beberapa kecamatan yang termasuk dalam area dalam radius 10-20 kilometer antara lain adalah kecamatan Manisrenggo dan Karangnongko serta beberapa desa di kecamatan Jatinom. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi berpotensi menimbulkan korban, kerusakan dan kerugian tidak hanya pada desa-desa di kecamatan Kemalang, tetapi juga mungkin menjadi ancaman bagi desa-desa yang jauh di luar Kabupaten Klaten.

2. Dampak Terhadap Kependudukan

Dampak Erupsi Gunung Merapi terhadap aspek kependudukan diasumsikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel.13. Skenario Dampak Terhadap Kependudukan

Kec.	Jml Desa/Kel	Jumlah Penduduk	Terancam		Meninggal		Luka, Sakit, dll		Hilang		Mengungsi	
			%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa
Kemalang	13	36,086	100%	36,086	0.0%	0	1%	361	0.0%	0	100%	36,086
Manisrenggo	16	39,884	100%	39,884	0.0%	0	0.30%	120	0.0%	0	30%	11,965
Karangnongko	14	37,371	100%	37,371	0.0%	0	0.10%	37	0.0%	0	10%	3,737
Jatinom	18	54,472	100%	54,472	0.0%	0	0.10%	54	0.0%	0	10%	5,447
		167,813		167,813				572				57,236

Secara khusus dampak erupsi Gunung Merapi diasumsikan sebagai berikut :

Jumlah total Penduduk 4 (empat) kecamatan berjumlah 167.813 jiwa. Jumlah penduduk yang terancam ada di Kecamatan Kemalang 100% (36.086), Kecamatan Manisrenggo 100% (39.884), Kecamatan Karangnongko 100% (37.371) dan Kecamatan Jatinom 100% (54.472). Sedangkan jumlah warga yang akan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung akibat debu vulkanik atau karena sebab lain 572 orang diasumsikan dari Kecamatan Kemalang 1% (361), Kecamatan Manisrenggo 0,3% (120), Kecamatan Karangnongko 0,1% (37) dan Kecamatan Jatinom 0,1% (54). Total Jumlah pengungsian dari 4 kecamatan tersebut adalah 57.236 orang.

Sedangkan untuk asumsi dampak pada penduduk rentan adalah sebagai berikut :

Kelompok rentan merupakan kelompok masyarakat yang harus dilindungi dari paparan kabut asap meliputi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, anak-anak, lansia serta difabel. Paparan debu Vulkanik pada kelompok rentan dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan kesehatan berupa ISPA, Penglihatan dan penyakit ikutan lainnya. Jumlah masing-masing kelompok rentan diperkirakan dengan nilai prosentase terhadap jumlah populasi penduduk total. Ibu hamil sebanyak 1% dari populasi perempuan, ibu menyusui 2% dari populasi perempuan, bayi dan balita 5% dari total populasi, anak-anak 20%, lansia 7% dari total dan difabel 1% dari total populasi. Atas perhitungan asumsi tersebut maka kelompok rentan yang akan terdampak adalah sebanyak 57.931 Jiwa.

Tabel. 14. Dampak Pada penduduk Rentan

No	Kecamatan	Jml Desa	Jumlah Penduduk		Total	Bumil	Busui	Bayi & Balita	Anak	Lansia	Difabel
			L	P		1%	2%	5%	20%	7%	1%
1	Kemalang	13	17,899	18,187	36,086	182	364	1,804	7,217	2,526	361
2	Manisrenggo	16	19,448	20,436	39,884	204	409	1,994	7,977	2,792	399
3	Karangnongko	14	18,510	18,861	37,371	189	377	1,869	7,474	2,616	374
4	Jatinom	18	6,864	27,608	54,472	276	552	2,724	10,894	3,813	545
	Jumlah	61	82,721	85,092	167,813	851	1,702	8,391	33,563	11,747	1,678

E. Dampak Terhadap Fasilitas Publik dan Aset

Bencana Erupsi Gunung Merapi diprediksi juga akan mengancam berbagai fasilitas dan aset negara maupun masyarakat jika kebakaran hutan maupun kebakaran lahan yang terjadi mengenai fasilitas dan aset yang dapat terbakar. Sarana vital seperti Puskesmas, Pustu, jaringan air, dan pasar mengalami gangguan serius selama 30 hari. Begitu pula fasilitas umum seperti sekolah dan kantor pemerintah penyedia layanan publik, masing-masing mengalami gangguan fungsi selama 30 hari. Rumah penduduk tidak dapat dihuni selama 30 hari.

- Terganggunya lalu lintas darat dan udara
- Bangunan baik permukiman maupun fasilitas publik yang dekat dengan hutan, lahan/perkebunan yang terbakar.
- Terhentinya kegiatan belajar mengajar untuk sekolah-sekolah baik pendidikan usia dini (PAUD) Taman Kanak- Kanak, Pendidikan dasar dan menengah.
- Terganggunya pelayanan kesehatan di Rumah sakit, Puskesmas, Pustu atau Poskedes
- Terganggunya pusat-pusat ekonomi di kecamatan dan desa.

F. Dampak Terhadap Ekonomi

Dari sektor ekonomi dampak dari bencana asap akibat Erupsi Gunung Merapi adalah sebagai berikut :

1. Merugikan masyarakat yang mata pencahariannya tergantung hasil pertanian dan perkebunan di sekitar Gunung Merapi.
2. Berkurangnya penghasilan masyarakat karena keterbatasan ruang gerak akibat tinggal dipengungsian;
3. Terancamnya mata pencaharian ternak kesulitan mencari rumput yang pengaruh adanya abu vulkanik dan berbahaya bagi ternak
4. Terganggunya produktifitas dan proses produksi UKM-UKM yang ada di seputar kemalang dan sekitarnya, hal ini juga karena bahan baku yang sulit dalam masa bencana
5. Meningkatnya inflasi karena terganggunya suplai barang akibat kendala transportasi, hal ini berpengaruh pada tingginya harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Klaten;
6. Terganggunya transportasi darat, dan udara yang pada gilirannya mengganggu perekonomian
7. Terhentinya kegiatan pasar-pasar tradisional, terganggunya kegiatan pertokoan dan pasar modern.

Tabel. 15. Asumsi Dampak Pada Ekonomi

No	Jenis	Jumlah/Unit	Tingkat Kerusakan			Lama Gangguan Fungsi (Hari)
			Berat	Sedang	Ringan	
A.	Pasar Tradisional	6 Unit		6 Unit	30	
B	Pertokoan/Perkiosan	712 unit		712 unit	30	
C	Hasil pertanian	15%		15%	30	

G. Dampak Terhadap Pemerintahan

Dampak Erupsi Gunung Merapi juga akan berpengaruh pada sektor pemerintahan, terutama yang terkait dengan bidang pelayanan kepada masyarakat dan menurunnya frekuensi kegiatan, terganggunya teknis pelayanan umum (publik)

karena kantor pemerintah yang harus mengalami perpindahan sementara karena pengungsian.

H. Dampak Terhadap Lingkungan

Lingkungan fisik yang turut terancam akibat Erupsi Gunung Merapi antara lain :

1. Mengurangi keanekaragaman hayati di hutan / terganggunya ekosistem gambut;
2. Menyebabkan bencana hidrometeorologi yang mungkin disebabkan karena abu vulkanik yang ada di udara (musim kering, musim hujan menyebabkan banjir lahar hujan dan longsor);
3. Berkurangnya mutu air dan udara karena tercemar abu vulkanik;
4. Berkurangnya kawasan hutan wisata, lahan pertanian/perkebunan.
5. Berkurangnya keanekaragaman hayati flora, termasuk juga kerusakan serta ekosistem sungai;
6. Berkurangnya keanekaragaman fauna akibat kematian maupun hilang atau rusaknya habitat hidupnya
7. Terganggunya komposisi tanah dan air yang penting untuk lahan/ media hayati;

I. Dampak Terhadap Kesehatan

Asap yang timbul akibat Erupsi Gunung Merapi akan mengakibatkan pencemaran udara, sehingga skenario yang dikembangkan untuk akan berdampak pada kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) akibat abu vulkanik
2. Selain ISPA, pada kondisi pencemaran udara maka terdapat beberapa penyakit yang perlu mendapat perhatian secara lebih khusus seperti Asma bronkial, Bronkhitis, Radang Paru-paru.
3. Kasus penyakit diare, muntaber karena akibat musim kemarau dan menurunnya kualitas air.

Tabel.16. Dampak Pada Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Jumlah/ Unit	Tingkat Kerusakan			Lama Gangguan Fungsi (Hari)
			Berat	Sedang	Ringan	
A	Sarana dan Prasarana vital					30
1	Rumah Sakit	1	0	0	1	30
2	Puskesmas/Balai Pengobatan/Pustu	7	1	0	6	30
3	Air Bersih	61	61	0	0	30
B	Fasilitas Umum					
1	Sekolah	67	15	0	52	30
2	Kantor pemerintahan	65	3	0	62	30
3	Pasar	4	0	0	0	30
C	Permukiman penduduk					

No	Jenis	Jumlah/ Unit	Tingkat Kerusakan			Lama Gangguan
			Berat	Sedang	Ringan	
1	Rumah	28.000	2000		26.000	30

Tabel .17. Asumsi Dampak Pada Lingkungan

No	Jenis	Tingkat Kerusakan			Keterangan
		Berat	Sedang	Ringan	
A	Pencemaran (air, udara, ...)	V			Air sumur terkena abu vulkanik
B	Kerusakan hutan/lahan	V			Karena semua populasi terkena dampak
C	Keseimbangan alam		V		Terbakarnya hutan karena awan panas atau lontaran lava pijar memaksa spesies endemik seperti monyet dan satwa burung keluar dari hutan dan mencari makan di kebun warga
D	Alih fungsi hutan		V		Kawasan hutan yang terbakar akibat awan panas membutuhkan waktu lama untuk kembali berfungsi seperti semula sehingga rentan dijadikan permukiman.

BAB IV

PENETAPAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT

Tujuan Penanganan Darurat

Tujuan penanganan darurat yakni;
“Mengerahkan seluruh sumberdaya dan upaya untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Klaten dari dampak Erupsi Gunung Merapi dan mengembalikan kehidupan lebih baik dengan perspektif pengurangan risiko bencana”

Kebijakan Penanganan Darurat

1. Mengorganisasikan dan mengerahkan seluruh potensi sumberdaya baik pemerintah dan non pemerintah (Swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Ormas, Relawan Individu Telatih) untuk penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi.
2. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian tanggap darurat dengan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa tengah, dan tingkat Pusat serta Pemerintah Daerah lainnya
3. Menyediakan data tentang jumlah masyarakat terdampak, kerugian dan kebutuhan penanganan darurat
4. Penyediaan layanan kesehatan gratis pada semua masyarakat terdampak
5. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
6. Memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan;

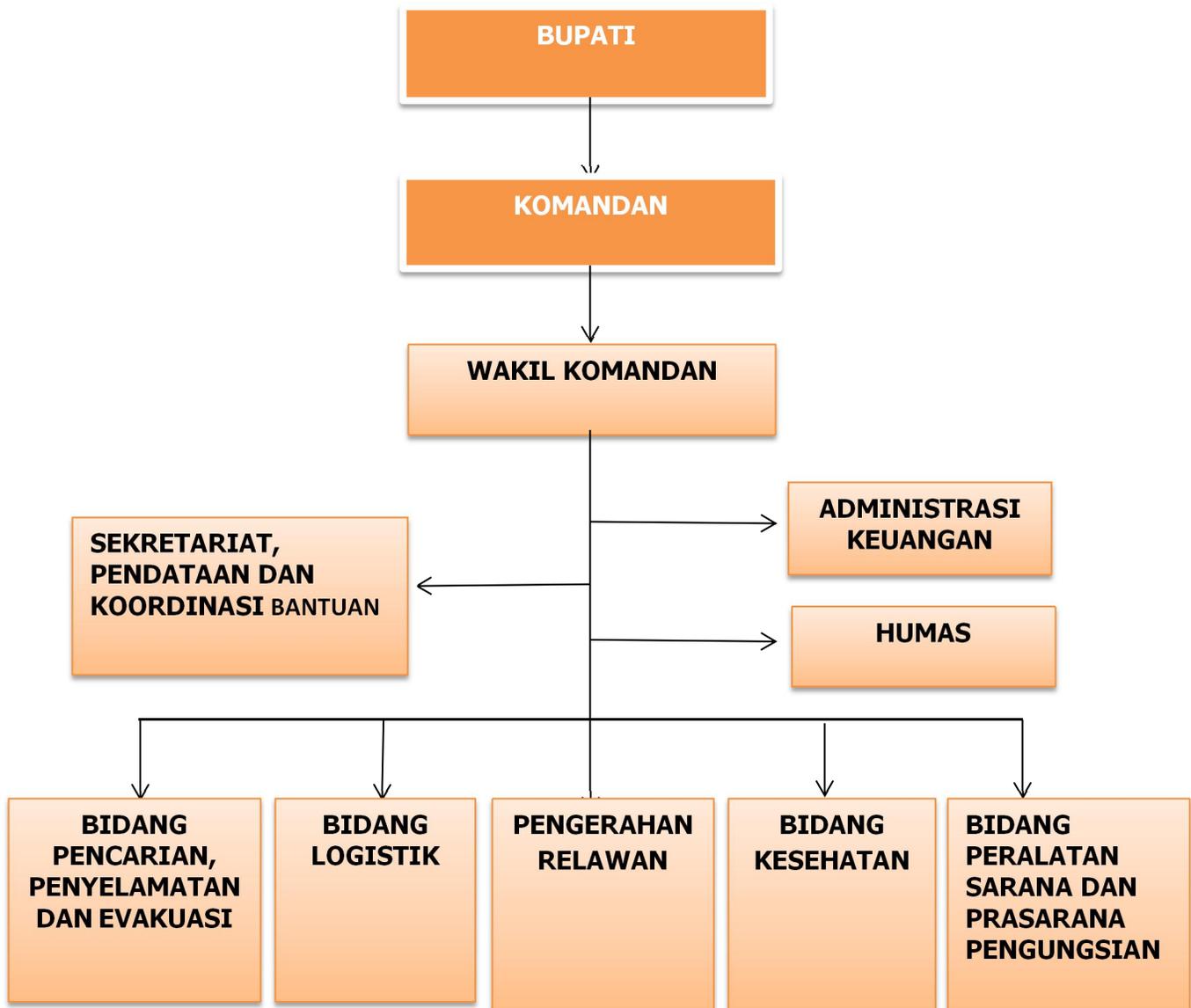
Strategi Penanganan Darurat

1. Menetapkan status keadaan darurat bencana selama 14 hari dan dapat diperpanjang.
2. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi lintas pelaku dan lintas sektor untuk penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi secara menyeluruh
3. Mendirikan Posko Penanganan darurat Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten.
4. Mendirikan Posko Lapangan penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi di setiap Tempat Evakuasi Akhir shelter (3 shelter)
5. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
6. Melakukan pencarian, Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terjebak Erupsi Gunung Merapi
7. Mendirikan layanan kesehatan gratis pada semua masyarakat terdampak
8. Menyediakan fasilitas rujukan rumah sakit daerah dalam perawatan korban luka dan meninggal
9. Memberikan bantuan makanan pokok pada seluruh masyarakat terdampak
10. Mendirikan posko pengungsian kelompok rentan di setiap desa paseduluran
11. Melakukan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

BAB V PERENCANAAN BIDANG OPERASI

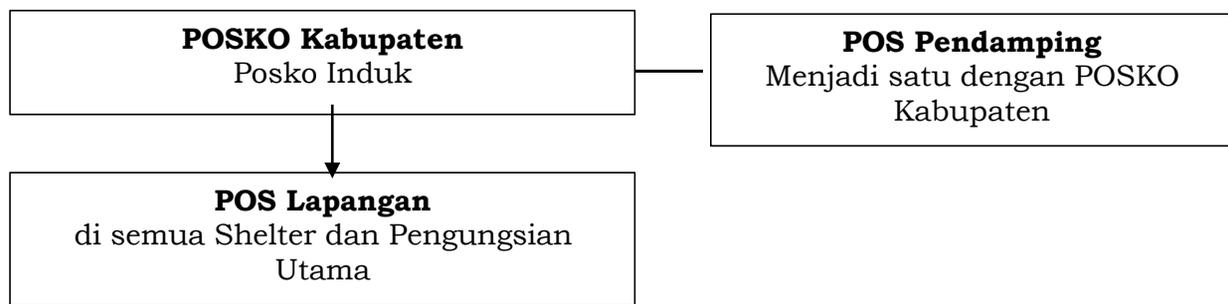
Rancangan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Struktur organisasi komando TDB Erupsi Gunung Merapi tingkat Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Bupati Bupati nomor 7 tahun 2014 tentang Kedaruratan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:



Rencana Lokasi Pos Komando dan Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Pos Komando Kabupaten Klaten berada di Kantor Bupati Klaten atau lokasi lainnya yang memadai. Pos pendamping baik provinsi dan pusat berada di lokasi sama dengan Pos Kabupaten. Pos kabupaten dan pos pendamping menangani seluruh upaya pengerahan sumberdaya dalam penanganan darurat. Pos Lapangan berlokasi di 4 kecamatan wilayah Kabupaten Klaten dan menangani distribusi sumberdaya yang dibutuhkan di setiap desa wilayah masing-masing kecamatan. Pos Perlindungan kelompok rentan berlokasi di setiap Shelter dan Posko Desa Paseduluran dan tempat-tempat pengungsian utama.



Rencana Lokasi Tempat Pengungsian Beserta Kapasitasnya

Lokasi pengungsian yang telah ditetapkan yaitu Shelter Kebondalem Lor khusus bagi warga yang datang dari Wilayah Kawasan Rawan Bencana III Desa Balerante, Shelter Menden untuk Warga dari Kawasan Rawan Bencana III Desa Sidorejo dan Shelter Demak Ijo untuk warga yang berasal dari Kawasan Rawan Bencana III Desa Tegalmulyo. Ketiga shelter tersebut bisa memuat sekitar 1000 jiwa atau kira-kira untuk 250-300 KK.

Shelter tersebut akan ditopang dengan tempat pengungsian satelit yang bertempat di desa yang sama untuk seluruh warga dari Kawasan rawan Bencana III sesuai dengan Shelter yang disediakan yaitu Desa Balerante di Kebondalem Lor, Desa Sidorejo di Desa Menden dan Desa Tegalmulya di Desa Demak Ijo.

Selain Shelter yang berada di (3) tiga desa tersebut masyarakat di daerah Kemalang dan Manisrenggo juga sudah membangun persaudaraan dengan desa-desa dibawah, dan program itu selanjutnya disebut dengan Desa Paseduluran. Masing-masing desa tersebut dapat menampung kebutuhan pengungsian dari daerah-daerah atas terutama Desa-desa di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Manisrenggo. Masing-masing desa dibawah dapat menampung pengungsian antara 400 - 500 kepala keluarga.

Tempat-tempat pengungsian utama yang lain yang disediakan antara lain adalah Pendopo Kabupaten, Gedung Olah raga Gelarsena, Komplek TNI Depo Wedi, yang masing-masing dapat menampung 500-600 Kepala keluarga. Terkait dengan desa paseduluran jumlah desa dan pasangan “sedulur” akan menjadi lampiran dari dokumen ini.

Perencanaan Penanganan Darurat Bencana

Kebijakan dan strategi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan acuan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi. Untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi maka perlu ditetapkan rencana penanganan darurat bencana sesuai Perka BNPB No. 3/2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Perencanaan ini merupakan langkah teknis dan manajerial dalam pencapaian kebijakan dan strategi. Untuk itu ditetapkan perencanaan penanganan darurat bencana sebagai berikut :

1. Manajemen Pos Komando Penanganan Darurat Bencana
2. Bidang Operasi Sub Bidang Pencarian Pertolongan dan Evakuasi
3. Bidang Operasi Sub Bidang Logistik
4. Bidang Operasi Sub Kesehatan
5. Bidang Operasi Sub Bidang Pengerahan Relawan
6. Bidang Operasi Sub Sarana dan Prasarana Pengungsian

A.1. Manajemen Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana ini mulai dibentuk sejak dikelurkannya Surat Keputusan Bupati Klaten tentang Status Keadaan Darurat Bencana Erupsi Gunung Merapi. Posko Penanganan Darurat Bencana berperan sebagai pengendali semua kegiatan tanggap darurat dan memastikan bahwa semua kebutuhan bidang-bidang operasi terpenuhi untuk memperlancar kegiatan tanggap darurat di lapangan. Pos Komando PDB dipimpin oleh komandan pengendali kegiatan tanggap darurat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Klaten.

D.1.a. Situasi

Setelah diperoleh informasi yang valid tentang adanya kenaikan status gunung merapi dari Waspada Ke Siaga/Awas Bupati Kabupaten Klaten menetapkan status darurat bencana, maka Pos Komando diaktivasi dan mengaktifkan bidang-bidang penanganan darurat bencana yang telah disepakati oleh para stakeholder penanganan darurat bencana Kab. Klaten, serta mengkoordinasikan dan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan.

D.1.b. Sasaran

1. Terkoordinasinya kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang penanganan darurat bencana
2. Terinventarisasinya jumlah masyarakat terdampak, kerugian harta dan benda, sarana dan prasarana umum.
3. Terinventarisasinya peralatan dan logistik lainnya yang digunakan untuk penanggulangan bencana Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Klaten.
4. Terkendalinya upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.
5. Terkoordinirnya semua bantuan kemanusiaan, baik personil relawan maupun materiil melalui POSKO PDB
6. Terlaksananya upaya penanggulangan Erupsi Gunung Merapi.

D.1.c. Kegiatan

Tabel 18. Kegiatan Manajemen Posko PDB

No	Kegiatan	Pelaku		Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab	Waktu Dimulai	Waktu Berakhir	
1.	Mendirikan Posko	BPBD, BMKG, PU, TNI, POLRI DINSOS, BAPPE DA, DINKES, SAR PMI, SATPOL PP, DAMKAR, DINAS PENDIDIKAN, PLN	BPBD	Pada Saat ditetapkan Keadaan Penanganan darurat bencana	Pada Saat Keadaan Penanganan darurat bencana dinyatakan selesai.	
2.	Rapat Koordinasi Kegiatan Penanggulangan	BPBD, BMKG, PU, TNI, POLRI DINSOS, BAPPE DA, DINKES, SAR PMI, SATPOL PP, DAMKAR, DINAS PENDIDIKAN, PLN	KOMANDAN TANGGAP DARURAT	Sewaktu-waktu		
3.	Mengatur dan	BPBD	KEPALA ATAU	Setiap waktu		

No	Kegiatan	Pelaku		Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/ Lembaga	Penanggung jawab	Waktu Dimulai	Waktu Berakhir	
	mengendalikan Kegiatan Posko		KEPALA PELAKSANA BPBD			
4.	Memberikan , menerima dan mencatat informasi	Petugas Posko Yang Ditunjuk	BPBD	Setiap waktu		
5.	Membuat laporan kegiatan penanggulangan dan perkembangan dampak bencana	BPBD	KEPALA ATAU KEPALA PELAKSANA BPBD	Sesuai Kebutuhan		
6.	Memberikan arahan pelaksana kegiatan	BPBD dan Komandan Tanggap Darurat	KEPALA ATAU KEPALA PELAKSANA BPBD	Setiap waktu		
7.	Mengendalikan pelaksanaan kegiatan	KOMANDAN TANGGAP DARURAT	KEPALA ATAU KEPALA PELAKSANA BPBD	Setiap waktu		

D.1.d. Proyeksi kebutuhan sumberdaya Manajemen Posko PDB

Tabel 19. Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya Manajemen Posko PDB

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume			Strategi Pemenuhan Kebutuhan
			Jumlah kebutuhan	Jumlah Tersedia	Jumlah Kekurangan	
1	Koordinasi					
	Rapat koor.PB	Frek.	6	0	6	
	Rakor teknis di posko	Frek.	28	0	28	
2	Personil					
	- POSKO Kabupaten	org	10	10		
	- POSKO Lapangan	org	24	24		
3	Alat Komunikasi					
	- Rig	set	7	7	-	
	- HT	unit	30	30	-	
	- SSB	set	1	0	1	Membeli
	- Repeater VHF	set	1	0	1	Membeli
	- Komputer + link ITKP	set	1		1	Membeli
	- Internet-mobile	set	1	0	1	Kerjasama Telkom
4	PENERANGAN					
	- Kabel lampu	m	300	0	300	Membeli
	- Fitting	bh	40	0	40	Membeli
	- Bola lampu	bh	40	0	40	Membeli
	- GENSET	unit	5	0	5	Membeli
	- BBM	lt	2500	0	2500	Membeli
	- Senter	bh	25	0	25	Membeli

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume			Strategi Pemenuhan Kebutuhan
			Jumlah kebutuhan	Jumlah Tersedia	Jumlah Kekurangan	
5	TENDA POSKO	unit	5	5		
6	Peralatan makan dan minum	set	7	7		
7	ATK					
	- White Board	bh	7	7	-	
	- Buku tulis	bh	50	0	50	Membeli
	- Ballpoint	bh	50	0	50	Membeli
	- Spidol permanen	bh	50	0	50	Membeli
	- Spidol Boardmarker	bh	50	0	50	Membeli
	- Laptop	unit	6	6	0	Membeli
	- Printer	unit	6	0	6	Membeli
	- Kertas HVS	rim	25	3	22	Membeli
	- Tinta printer	unit	120	0	120	Membeli
	- Amplop	kotak	25	0	25	Membeli
	- Odner	bh	25	0	25	Membeli
	- Meterai	lb	50	0	50	Membeli
	- Kwitansi	bdl	50	0	50	Membeli
	- Staples	bh	5	0	5	Membeli
	- Isi staples	dos	5	0	5	Membeli
	- Kertas Plano	lb	200	0	200	Membeli
	- Map kertas	lb	100	0	100	Membeli
	- Map plastic	lb	100	0	100	Membeli
	- Lak ban	gulung	25	0	25	Membeli
8	POS KEAMANAN	unit	5	5		
9	Kendaraan	unit				
	- Roda 2	Unit	14	14		Satpol, TNI, Polres, Dishub, BPBD, Relawan
	- Roda 4	unit	7	7		Satpol, TNI, POLres, Dishub, BPBD, Relawan

D.2. Bidang Operasi Sub Bidang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi

Sub Bidang ini bertugas melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi masyarakat terdampak untuk segera menuju ke tempat yang aman serta melakukan penanganan gawat darurat pada korban. Pencarian dan pertolongan tidak direkomendasikan dilakukan pada daerah-daerah terdampak langsung pascaletusan yaitu di daerah yang terlanda awan panas sampai tempat tersebut dinyatakan aman untuk melakukan pencarian dan pertolongan.

D.2.a. Situasi

Selalu mendapatkan informasi terbaru terkait dengan status dan kondisi terkini terkat dengan Gunung Merapi dari lembaga yang berwenang dan resmi yaitu BPTKG, BNPB, BPBD Provinsi atau PVMBG.

D.2.b. Sasaran

1. Terevakuasinya seluruh masyarakat di daerah terdampak.

2. Terlindunginya kelompok rentan dari ancaman bencana mulai dari anak-anak, perempuan, ibu hamil, difabel, orang yang sedang sakit, lansia dan lain-lainnya.

D.2.c. Kegiatan

Tabel 20. Kegiatan Bidang Operasi Sub Bidang Pencarian, Pertolongan dan Pemadaman

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/lembaga	Penanggung jawab	Waktu dimulai	Waktu berakhir	
1	Telaah Informasi Status	Kelompok Relawan, POLRES, KODIM/KORAMIL, KELOMPOK SIAGA BENCANA, SAR, BPBD	BPBD			
2	Penyebaran informasi Terkini tentang status dan kondisi Gunung Merapi	Humas, BPBD,	Humas			15 Menit
3	Koordinasi ke koordinator lapangan	BPBD, SAR	Koordinator lapangan			30 Menit
4	Pengecekan lapangan	TRC	Koordinator lapangan			1,5 jam
5	Penyiapan Shelter	BPBD dan Kelompok Relawan	Koordinator lapangan			2,5 jam

D.2.d. Proyeksi Kebutuhan sumberdaya

Tabel 21. Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya Sub Bidang Pencarian, pertolongan dan Evakuasi

No	Jenis Sumberdaya	Satuan	Volume			Strategi Pemenuhan kebutuhan
			Jumlah kebutuhan	Jumlah Tersedia	Jumlah Kekurangan	
A. Kebutuhan Personil						
	Personil	Org	600	600		Tercukupi dari personil gabungan SAR, , TNI, POLRI, Relawan Peduli Api dll.
B. Kebutuhan Sarana dan Prasarana						
	Laptop	Unit	1	1		
	PC	Unit	1	1		
	GPS	Unit	5	2	3	Membeli
	Peta kerja	Unit	1	1		
	Tali Pengaman Evakuasi 300 m	Unit	4	1		Membeli
	Motor	Unit	1	5	4	BPBD
	Chainsaw	Buah	4	1	3	
	Parang	Buah	30	-	30	Membeli
	HT	Buah	15	10		
	Helikopter	Unit	1	-		*BPBD
	Mesin pemadam	Unit	5	3		

No	Jenis Sumberdaya	Satuan	Volume			Strategi Pemenuhan kebutuhan
			Jumlah kebutuhan	Jumlah Tersedia	Jumlah Kekurangan	
	Mobil Operasional	Unit	5	2		*BPBD
	Mobil Damkar K 500 liter	Unit	1	1		*Tersedia di Damkar Kab. Klaten
	Tanki Air	unit	3	-		
C	Barang Habis Pakai					
1	BBM mesin	Liter	600	-	600	Membeli
2	Oli mesin	Liter	20	-	20	Membeli
3	Oli Samping	Liter	20		20	Membeli
4	Solar	Liter	100		100	Membeli
5	Baterai Alkalin	Buah	50		50	Membeli
6	Snack s	Bungkus/hari	1800	-	1800	Membeli
7	Makan & minum	Bungkus/hari	1800	-	1800	Membeli
8	Masker	Dus	30		30	Membeli

D.3. Bidang Operasi Sub Bidang Logistik

D.3.a.Situasi

Dengan rencana mendirikan posko PDB dan Pos Lapangan, maka pos-pos tersebut perlu dilengkapi dengan peralatan-peralatan dan kelengkapan-kelengkapan agar bisa operasional. Setiap pos memerlukan kelengkapan-kelengkapan untuk menunjang pelayanan pos agar lebih optimal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pos. Tugas Bidang Operasi Sub Bidang logistik adalah memastikan bahwa seluruh peralatan dan kelengkapan posko terpenuhi.

D.3.b.Sasaran

Sasaran dari kegiatan Sub Bidang Logistik adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya seluruh kebutuhan Posko agar posko dapat operasional sesuai dengan maksud dan tujuannya.
2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat di Posko, karena posko sering menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan darurat.

V.E.3.c.Kegiatan

Tabel 22. Kegiatan Sub Bidang Logistik

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi	Penanggung jawab	Waktu dimulai	Waktu berakhir	
1	Pendataan Kebutuhan Posko baik Kelengkapan dan Peralatan maupun Sumberdaya Manusianya.	PU, BLH,PMI, Tagana, , Satpol PP, Polres, KODIM,	BPBD	Pada Saat ditetapkan Keadaan Penanganan darurat bencana	Pada Saat Keadaan Penanganan darurat dinyatakan selesai.	
2	Memenuhi Kebutuhan Posko dalam bentuk	Damkar, PMI, Tagana, , Satpol PP, Polres	BPBD	Pada Saat ditetapkan Keadaan Penanganan	Pada Saat Keadaan Penanganan darurat	

	penyediaan peralatan dan kelengkapan serta konsumsi petugas posko .			darurat bencana	bencana dinyatakan selesai.	
3	Memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di posko	Damkar, PMI, Tagana, , Satpol PP, Polres	BPBD	Pada Saat ditetapkan Keadaan Penanganan darurat bencana	Pada Saat Keadaan Penanganan darurat bencana dinyatakan selesai.	

D.3.d. Proyeksi Kebutuhan sumberdaya

Tabel 23. Proyeksi Kebutuhan sumberdaya Sub Logistik

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume			
			Jumlah kebutuhan	Ketersediaan	Jumlah Kekurangan	Strategi Pemenuhan
A. Personil						
1	Posko Induk	org	35	35		
2	Posko Kec Klaten	org	20	10		
3	Shelter	org	20	10		
4	Shelter	org	20	10		
5	Shelter	org	20	10		
B. SARANA DAN PRASARANA						
1	Tenda Serbaguna	Buah	4	4		
2	Tenda Pleton	Buah	4	4		
3	Tenda Regu	Buah	5	5		
4	Mobil Pick Up	Unit	8	8		
5	Mobil Tangki	Unit	4	4		
6	Mobil Personil	Unit	4	4		
7	Mobil Ambulance	Unit	8	8		
8	Tandu	Buah	8	8		
9	Tabung Oksigen	Buah	4	4		
10	Tampungan air	Buah	4	4		
11	Peralatan dapur	Buah	4	0	4	Membeli
12	Genset	Buah	4	2	2	Membeli
13	Bola Lampu	Buah	40	0	40	Membeli
14	Pelbed	Buah	100	0	100	Membeli
15	Slimut	Buah	100	0	100	Membeli
16	Sepatu Boot	Pasang	100	0	100	Membeli
C Barang Habis Pakai						
1	BBM mesin	Liter	600	-	600	Membeli
2	Oli mesin	Liter	20	-	20	Membeli
3	Oli Samping	Liter	20	-	20	Membeli
4	Solar	Liter	100	-	100	Membeli
5	Air mineral	Dus	400	-	400	Membeli
6	Beras	Ton	2	-	2	Membeli
7	Mie Instan	Dus	100	-	100	Membeli
8	Sarden	Dus	40	-	40	Membeli

D.4. Bidang Operasi Sub Kesehatan

Dengan adanya abu vulkanis artinya udara sangat tercemar dan berpotensi menyebabkan gangguan akan ketersediaan air bersih dan gangguan kesehatan serius pada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak-anak, lansia, difable) serta gangguan proses belajar mengajar pada anak-anak sekolah. Untuk mencegah kemungkinan gangguan – gangguan tersebut maka kelompok masyarakat perlu

mendapatkan perlindungan. Abu Vulkanik sangat berbahaya jika terhirup atau masuk dalam alat penglihatan atau mata, akibatnya dapat melukai paru-paru atau mata. Ketersediaan masker menjadi penting walaupun dalam pengungsian termasuk ketersediaan oksigen jika ada penyintas yang bermasalah dengan pernapasan seperti sesak napas atau asma.

D.4.a.Sasaran

1. Terpenuhinya kebutuhan air bersih
2. Terlindunginya kelompok rentan dari bahaya debu vulkanik
3. Terpenuhinya kebutuhan kesehatan, dan keselamatan masyarakat.
4. Terpenuhi kebutuhan kesehatan, keamanan dan keselamatan serta kebutuhan dasar kelompok rentan
5. Memastikan jika ada penyintas yang terluka atau terganggu kesehatannya segera mendapatkan penanganan termasuk jika ada kebutuhan untuk segera mendapatkan penanganan lebih lanjut.
6. Berkerjasama dengan tim logistik untuk tersedianya kebutuhan fasilitas kesehatan bagi masyarakat berkebutuhan khusus atau orang sakit.

D.4.b.Kegiatan

Tabel 24. Bidang Operasi Sub Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/lembaga	Penanggung jawab	Waktu dimulai	Waktu berakhir	
1	Melakukan koordinasi seluruh lembaga dan instansi terkait	PDAM,Dinkes, Satpol PP, Dinsos, Tagana, PMI, Dukcapil, Dishub, Diskominfo, Polres, Kodim/Koramil	BPBD	Ketika sudah ada laporan bahaya Erupsi Gunung Merapi		1 hari
2	Mengumpulkan dan menganalisis data kelompok rentan	Dinkes, Satpol PP, Dinsos, Tagana, PMI	Dukcapil	Setelah rapat koordinasi		2 hari
3	Memobilisasi seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk perlindungan kelompok rentan	Dinkes, Satpol PP, Dinsos, Tagana, PMI	BPBD	Setelah rapat koordinasi		2 hari
4	Membangun posko penanganan kelompok rentan di 4 kecamatan	Dinkes, Satpol PP, Dinsos, Tagana, PMI	BPBD	Setelah sumberdaya terkumpul		1 hari
5	Memberi perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar pada kelompok rentan	Dinkes, Satpol PP, Dinsos, Tagana, PMI	BPBD	Setelah kelompok rentan berada di posko perlindungan	Sampai kualitas udara aman bagi kelompok rentan	30 hari

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/lembaga	Penanggung jawab	Waktu dimulai	Waktu berakhir	
6	Memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak sekolah	Dinas Pendidikan,	BPBD	Setelah rapat koordinasi	Sampai kualitas udara aman bagi kelompok rentan	30 hari

D.4.d. Proyeksi Kebutuhan sumberdaya

Tabel 25. Proyeksi Kebutuhan Bidang Kesehatan

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume			Strategi Pemenuhan kebutuhan
			Jumlah kebutuhan	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Kekurangan	
A	Personil					
	Dokter	Orang	5	5		
	Paramedis	Orang	10	10		
	Bidan	Orang	5	5		
	Guru	Orang	10	10		
	Relawan Psikososial	Orang	5	5		
	TNI	Orang	6	6		
	PolRI	Orang	6	6		
B	Sarana dan Prasarana					
1	Masker tipe N 95	Buah	150.000	0	150.000	Membeli
2	Tabung Oksigen	Buah	12	0		Membeli
3	Tandu	Buah	8	8		
4	Kursi Roda	Buah	20	20		
5	Obat anti sesak	Buah	400	400		
6	Velbed	Buah	50	50		
7	Tikar	Lembar	100	100		Membeli
8	Kasur	Buah	50	0		Membeli
9	Tenda kedap udara	Buah	12	0		Membeli
10	BBM Genset	Liter	1500	0	1500	Membeli
11	Prlngkapan Dapur	Set	10	0	10	Membeli
12	Tenda Regu	Buah	10	0	10	Membeli
C	Barang Habis Pakai					
1	Beras	Ton	18	0	18	Membeli
2	Pakaian Bayi	Buah	500	0	500	Membeli
3	Pakaian Anak-Anak	Buah	500	0	500	Membeli
4	Handuk	Buah	500	0	500	Membeli
5	Sikat Gigi	Bua	500	0	500	Membeli
6	Pasta Gigi	Buah	500	0	500	Membeli
7	Sabun Bayi	Buah	500	0	500	Membeli
8	Sabun Mandi	Buah	500	0	500	Membeli
9	Sabun Cuci (1/2 Kg)	Buah	500	0	500	Membeli
10	Pembalut Wanita	Buah	200	0	200	Membeli
11	Ember	Buah	100	0	100	Membeli
12	Lauk-Pauk	Dus	100	0	100	Membeli
13	Air Mineral	Dus	180	0	180	Membeli
14	Susu Bayi (0-6bln)	Buah	500	0	500	Membeli
15	Susu Bayi (1-5thn)	Buah	500	0	500	Membeli
16	Bedak Bayi	Buah	500	0	500	Membeli

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume			Strategi Pemenuhan kebutuhan
			Jumlah kebutuhan	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Kekurangan	
17	Minyak Telon	Buah	500	0	500	Membeli
18	Pampers Bayi	Buah	500	0	500	Membeli
19	Bumbu Dapur	Kg	50	0	50	Membeli
20	Minyak Goreng	Liter	360	0	360	Membeli
21	Air bersih	Liter	5000	0	5000	Membeli
	Botol Susu (Dot)	Buah	500	0	500	Membeli

D.5. Bidang Operasi Sub Pengerahan Relawan

Sub Bidang Pengerahan Relawan bertujuan untuk memastikan bahwa relawan terdistribusi sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Semua relawan yang melakukan operasi tanggap darurat harus terdata dan harus melaporkan diri kepada posko untuk didata. Relawan tidak diperkenankan melakukan operasi pada kegiatan atau daerah yang memang tidak diperbolehkan atau hanya boleh dilakukan oleh relawan yang ahli dalam bidang tersebut.

Memastikan bahwa setiap tempat pengungsian mendapat pelayanan dari para relawan dengan melibatkan para penyintas untuk melakukan kegiatan mulai dari pendataan, distribusi logistik, dapur umum dan lain sebagainya.

D.5.a.Situasi

1. Relawan melakukan tugasnya sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman
2. Relawan dan masyarakat bersama-sama melakukan evakuasi sesuai dengan aturan atau SOP desa yang berlaku.
3. Relawan tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada para penyintas untuk melakukan sesuatu
4. Jumlah relawan setiap posko harus proporsional dengan jumlah penyintas.
5. Sub Bidang Pengerahan harus memastikan bahwa semua relawan terdata dan didistribusikan sesuai dengan permintaan posko, penyintas atau ada kebutuhan sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya.
6. Relawan diberi tanda pengenal.

D.5.b.Sasaran

1. Masyarakat terdampak Erupsi gunung Merapi
2. Relawan dan lembaga relawan yang menaunginya
3. Posko-posko, kelompok penyintasmengeri dan memahami prinsip-prinsip, tugas, fungsi, kewajiban relawan dalam penanggulangan bencana.

D.5.c.Kegiatan

Tabel 26. Kegiatan Sub Bidang Pengerahan relawan

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/lembaga	Penanggung jawab	Waktu dimulai	Waktu berakhir	
1	Koordinasi instansi terkait	BPBD,POLRI, TNI, SALPOL PP, PEMERINTAH KECAMATAN dan	BPBD	Setiap saat		1 hari

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/lembaga	Penanggung jawab	Waktu dimulai	Waktu berakhir	
		DESA, DINAS, SAR, PMI, DAMKAR, KELOMPOK RELAWAN.				
2	Sosialisasi Kepada Relawan, dan Masyarakat	BPBD ,POLRI, TNI, SALPOL PP, PEMERINTAH KECAMATAN dan DESA, SAR, PMI dan DAMKAR, KELOMPOK RELAWAN	BPBD	Setiap saat		

D.5.d. Proyeksi Kebutuhan sumberdaya

Tabel 27. Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya Sub Bidang Pengerahan Relawan

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume			Strategi Pemenuhan kebutuhan
			Jumlah kebutuhan	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Kekurangan	
A	Personil					
1.	Personil BPBD	Orang	12	12		
2	Fasilitator	Orang	12	12		
3	TNI POLRI	Orang	12	12		
B	Kebutuhan Sarana dan Prasarana					
1	LCD Proyektor	Buah	4	4		
2	Sound Sistem	Set	4	4		
3	ATK	Set	4	0		Membeli
4	Mobil	Nit	4	4		
C	Bahan Habis Pakai					
1	Konsumsi Peserta	Dus	400			
3	Insentif Petugas	Rupiah	1.200.000			

D.5. Bidang Operasi Sub Bidang Peralatan dan Sarana /Prasarana Pengungsian

Sub Bidang Peralatan dan Sarana/Prasarana Pengungsian bertugas untuk memenuhi kelayakan bagi para penyintas terkait dengan sandang, papan dan hunian yang layak selama di pengungsian. Selain untuk para penyintas, Sub Bidang ini juga perlu untuk menyediakan sandang, Papan dan Hunian sementara bagi para relawan yang tinggalnya jauh dari tempat peristiwa bencana terjadi.

V.E.5.a. Situasi

1. Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan, sandang, papan dan hunian dalam pengungsian
2. Relawan memerlukan dukungan makanan, sandang, papan dan hunian bagi mereka yang tinggal jauh dari tempat peristiwa bencana terjadi

D.5.b.Sasaran

1. Terpenuhinya kebutuhan makanan,pangan sandang, papan dan hunian masyarakat terdampak
2. Terpenuhinya kebutuhan terkait makanan, sandang, papan dan hunian bagi para relawan

D.5.c.Kegiatan

Tabel 28. Kegiatan Sub Bidang Sandang, Papan dan Hunian

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan		Durasi
		Instansi/lembaga	Penanggung jawab	Waktu dimulai	Waktu berakhir	
1	Koordinasi instansi terkait	BPBD, Dinkes, PMI, PRAMUKA, DISHUB, PUPR, ormas, TNI, RELAWAN	Dinas sosial	Darurat mulai	Darurat selesai	1 hari

D.5.d.Proyeksi Kebutuhan sumberdaya

Tabel 29. Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya Sub Bidang Peralatan dan Sarana /Prasarana Pengungsian.

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume			Strategi Pemenuhan kebutuhan
			Jumlah kebutuhan	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Kekurangan	
A	Personil					
1	Tukang Batu	Orang	16	0	16	Relawan
2	Tukang Kayu	Orang	16	0	16	Relawan
3	Pembantu Tukang	Orang	32	0	32	Relawan
4	Drafter	Orang	1	0	1	Relawan
5	Relawan	Orang	8	0	8	Relawan
B	Sarana dan Prasarana					
1	Pakaian anak-anak	Lembar	500			membeli
2	Pakaian Bayi	Lembar	500			membeli
3	Pakaian Dewasa	Lembar	100			membeli
4	Kayu	Potong	Menyesuaikan kebutuhan			membeli
5	Batu-bata/Batako	Biji	Menyesuaikan kebutuhan			membeli
6	Seng	Lembar	Menyesuaikan kebutuhan			membeli
7	Paku	Kg	Menyesuaikan kebutuhan			membeli
8	Peralatan tukang	Set	Menyesuaikan kebutuhan			membeli
9	Pasir	Kubik	Menyesuaikan kebutuhan			membeli
10	Semen	Sak	Menyesuaikan kebutuhan			membeli
11	Air	Liter	Menyesuaikan kebutuhan			membeli
12	Insentif relawan	Rupiah	50 juta			membeli

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume			
			Jumlah kebutuhan	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Kekurangan	Strategi Pemenuhan kebutuhan
C.	Barang Habis Pakai					
1	Beras	Kg	Menyesuaikan kebutuhan			membeli
2	Sayur	Kg	Menyesuaikan kebutuhan			membeli
3	Laukpauk	Kg	Menyesuaikan kebutuhan			membeli

BAB VI

RENCANA TINDAK LANJUT

Diseminasi Rencana Kontingensi

Rencana kontingensi ini akan bermanfaat jika diketahui dan dipahami oleh banyak pihak. Diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada semua pihak terkait menjadi keharusan untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan rencana tersebut.

Rapat Koordinasi Renkon. Dipimpin oleh Gubernur/Bupati. Dilakukan sbkm kejadian bencana. Rapat koordinasi PDB dilakukan untuk melaporkan Renkon yang sudah dibuat kepada pejabat pemerintah setempat dan koordinasi kesiapan sumberdaya yang tersedia berdasarkan kesepakatan yang dituangkan di dalam dokumen renkon tersebut, menemukenali kesenjangannya dan merekomendasikan jalan keluarnya

Aktivasi Rencana Kontingensi

Rencana kontingensi sebagai dasar penyusunan rencana operasi setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan pada saat penanganan darurat bencana. Teknis dan mekanisme aktivasi dibahas lebih terperinci pada dokumen Protap.

Aktivasi Rencana Kontijensi akan dilakukan apabila sudah ada kenaikan status Gunung Merapi dari Waspada ke Siaga atau Awas. Laporan tersebut akan disampaikan BPBD kepada Bupati seterusnya BPBD akan mengundang setiap FORKORPIMDA dan OPD terkait untuk melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh (Bupati dan Wakil Bupati dan Sekda)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Klaten memaparkan laporan BPPTKG mengenai kondisi terkini Gunung Merapi dan kesiapan masyarakat terdampak kepada Bupati Klaten kepada tamu undangan. Selanjutnya pemimpin rapat (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) menetapkan status siaga bencana yang diperkuat dibuatnya Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Bupati, setelah itu dibentuklah sistim komando penanganan darurat bencana (SKPDB) sebagai manajemen pengurangan resiko bencana. Komandan SKPDB ditunjuk oleh Bupati

Dengan adanya sistim komando penanganan daerah bencana (SKPDB), penanganan darurat bencana asap yang disebabkan oleh Erupsi Gunung Merapi akan dapat ditangani secara efektif dan efisien.

Dalam Kondisi Darurat Bencana maka BPBD mendirikan Pos Komando sebagai sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB)

- a. Pos komando berfungsi sebagai pengendalian semua kegiatan tanggap darurat bencana bagi sektor-sektor yang dibentuk untuk melaksanakan penanganan darurat bencana. Komandan posko ditunjuk oleh Bupati Klaten sebagai pemimpin tertinggi di daerah.
- b. Sekretariat bertugas mengatur berapa biaya yang dikeluarkan pada kegiatan penanganan darurat bencana dan keperluan POSKO.
- c. Bidang perencanaan bertugas mengkoordinir proses proses kontijensi menjadi rencana operasi
- d. Bidang operasi terdiri dari sub bidang pelayan yang terdiri dari :
 1. Bidang Operasi Sub Bidang Pencarian Pertolongan dan Pemadaman
 2. Bidang Operasi Sub Bidang Logistik dan Peralatan
 3. Bidang Operasi Sub Bidang Air Bersih, Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan dan Pendidikan

4. Bidang Operasi Sub Bidang Penegakan Hukum
5. Bidang Operasi Sub Bidang Sandang dan Pangan Dan Hunian

Kaji Ulang Rencana Kontingensi

Kaji ulang atau penelaahan kembali bertujuan untuk memverifikasi dan memutakhirkan data-data Rencana kontingensi agar lebih sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya. Kaji ulang dapat dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi.

Uji Draft Rencana Kontingensi

Setelah disusun dan dikaji ulang, draft rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara seperti di bawah ini. Uji draft rencana kontingensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana kontingensi masuk akal untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi
Simulasi rapat koordinasi ini merupakan agenda finalisasi Rencana kontingensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi ini yakni:
 - a. Dipimpin oleh Kepala daerah/Sekretaris daerah.
 - b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya.
 - c. Merumuskan hasil draft Rencana kontingensi final disepakati bersama.
2. Kegiatan Table Top Exercise (TTX)
Merupakan latihan didalam ruangan, untuk menguji kemampuan setiap bidang operasi dan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada Rencana kontingensi.
 1. Kegiatan Uji Posko/Gladi Posko
Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang teriibat dalam rencana kontingensi sesuai bidang operasi masing-masing. Uji/gladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.
 2. Kegiatan Uji Lapang/Gladi Lapang
Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi

Formalisasi/Legalisisasi Rencana Kontingensi

Formalisasi/legalisisasi bertujuan untuk memformalkan dan melegalisasi rencana kontingensi melalui peraturan kepala daerah. Formalisasi ini penting untuk mengawal komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait dalam operasi tanggap darurat, sehingga akan mengikat secara hukum seluruh pemangku kepentingan penanganan darurat bencana.

BAB VII

PENUTUP

Demikian dokumen Rencana ini dibuat sebagai acuan kebijakan dan strategi serta landasan operasional bagi semua pihak di Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana Erupsi Gunung Merapi secara efektif, efisien dan terpadu.

Adapun proyeksi kebutuhan yang masih belum bisa tersedia kiranya dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga, instansi-instansi vertikal, lembaga-lembaga swasta, masyarakat, relawan dan lain-lain.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kontinjensi ini masih perlu penyempurnaan dan review secara berkala untuk mengaktualkan data yang ada . Rencana kontinjensi ini masih perlu penyempurnaan dan *review* secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi.